

SUPLEMEN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor: SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022

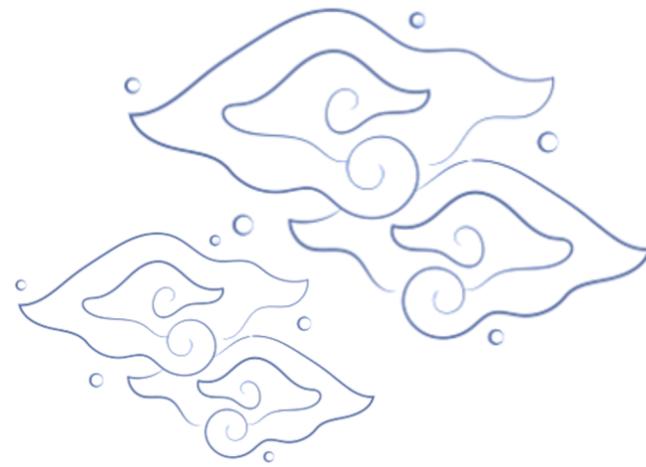


Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RENCANA KERJA TAHUN 2023 (REVISI)



RENCANA KERJA TAHUN 2023 (REVISI)



Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan tenaga, kreativitas dan keahliannya dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Revisi) ini, mereka adalah :

Kepala Biro Perencanaan; Kepala Bagian Rencana Program dan Anggaran; Bagian Rencana Program dan Anggaran Biro Perencanaan; Inspektorat Jenderal; Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari; Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan; Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun; Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim; Badan Standardisasi Instrumen LHK; Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Dokumen digital Revisi Rencana Kerja ini dapat diakses dengan memindai QR code berikut:



Renja KLHK Tahun 2023 (Revisi)

Disusun dan diterbitkan oleh Biro Perencanaan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim. Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia, kita dapat melaksanakan tugas kerja dengan baik.

Menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah melaksanakan penyesuaian kebijakan penganggaran tahun 2023, yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2023. Terhadap program dan kegiatan dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Kementerian Tahun 2023. Perubahan APBN lingkup Kementerian tahun 2023 ini diantaranya dengan *Automatic Adjustment* (AA) belanja pegawai dan belanja non pegawai, relaksasi (pemanfaatan) sebagian pagu blokir AA belanja non pegawai, realokasi pagu blokir AA belanja pegawai dan belanja non pegawai ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), Anggaran Belanja Tambahan (ABT) PNBPNP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), ABT PNBPNP pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PNBP Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan LH dan PNBPNP Denda Administrasi Bidang Kehutanan), *Top up* PNBPNP, serta *Top Up* Hibah Luar Negeri (HLN) dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN). Dokumen ini disusun sebagai bentuk internalisasi perubahan kebijakan fiskal, khususnya untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Secara umum, pagu Kementerian mengalami perubahan dari semula sebesar Rp6.912.784.958.000,- menjadi Rp7.266.132.608.000,- per 22 Desember 2023. Perubahan pagu ini secara langsung menuntut penyesuaian kinerja Kementerian. Secara ringkas, perubahan kinerja itu antara lain: (1) penambahan panjang tata batas kawasan hutan yang semula 40.534 km menjadi 44.974 km; (2) penambahan luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA yang semula

10,100 ribu hektar menjadi 21,240 ribu hektar; (3) penambahan jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani dari semula 250 kasus menjadi 480 kasus; (4) penambahan luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman yang semula 300.000 menjadi 600.000 hektar; (5) penambahan jumlah kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla yang semula 970 kelompok menjadi 1.200; (6) penambahan upaya penanggulangan karhutla melalui pemadaman darat yang semula 1.200 operasi menjadi 1.546 operasi; dan (7) penambahan pengawasan ketaatan hukum LHK oleh badan usaha yang semula 750 badan usaha menjadi 1.048 badan usaha.

Selanjutnya, penyesuaian anggaran dan target kinerja tersebut meningkatkan sumbangan Kementerian terhadap pelaksanaan Prioritas Nasional menjadi sebesar Rp3.314.901.967.000,- atau naik Rp194.475.284.000,- (6,23%) dari dukungan PN semula sebesar Rp3.120.426.683.000,-.

Kami menegaskan bahwa pembangunan serta pemenuhan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai rencana kerja dan perjanjian kinerja.

Semoga Allah SWT senantiasa menuntun dan meridhoi langkah kita. Aamiin.

Jakarta, 27 Desember 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc



DAFTAR ISI

PENGANTAR MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
KESINAMBUNGAN TEMA PEMBANGUNAN	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
KEMENTERIAN LHK DALAM ANGKA (REVISI)	3
PERJALANAN PERUBAHAN PAGU KEMENTERIAN LHK 2023	5
PERUBAHAN KINERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA ESELON I KEMENTERIAN LHK TA 2023	11
DUKUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL	28
PENUTUP	32
LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 (Revisi)	34



DAFTAR GAMBAR

1.	Perjalanan Perubahan Pagu Kementerian LHK TA 2023	6
2.	<i>Highlight</i> Kinerja Sekretariat Jenderal	14
3.	<i>Highlight</i> Kinerja Inspektorat Jenderal	15
4.	<i>Highlight</i> Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	16
5.	<i>Highlight</i> Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS Dan Rehabilitasi Hutan	17
6.	<i>Highlight</i> Kinerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	18
7.	<i>Highlight</i> Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	19
8.	<i>Highlight</i> Kinerja Badan Standardisasi Instrumen LHK	20
9.	<i>Highlight</i> Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	21
10.	<i>Highlight</i> Kinerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	22
11.	<i>Highlight</i> Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23
12.	<i>Highlight</i> Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	24
13.	<i>Highlight</i> Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	25
14.	<i>Highlight</i> Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	26
15.	<i>Highlight</i> Kinerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	27
16.	Persentase Revisi Dukungan Anggaran KLHK untuk PN Tahun 2023	31



DAFTAR TABEL

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Perubahan Pagu Per UKE I Lingkup Kementerian LHK TA 2023 | 12 |
| 2. | Distribusi Anggaran Prioritas Nasional dan <i>Major Project</i> Tahun 2023 (Revisi) | 31 |

KESINAMBUNGAN TEMA PEMBANGUNAN



2023

“ Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia ”

Keberdayaan masyarakat merata dan produktivitas di tingkat tapak dan peningkatan derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk bergulirnya ekonomi sirkular dan sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah.



2022

“ Memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural ”

Pemanfaatan ragam hayati secara aktual oleh masyarakat seperti menemukan momentumnya di masa pandemi. Di sini, Kementerian menyebutnya sebagai upaya membangun transformasi keunggulan ragam hayati dan yang semula hanya menjadi keunggulan komparatif, kini berangsur menjadi keunggulan kompetitif.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kerja Tahun 2023 (Revisi) ini menjabarkan penyesuaian anggaran terhadap target di tengah perubahan substansial sepanjang tahun 2023. Sebagai bentuk usaha yang adaptif, KLHK terus memperkuat titik balik sumbangsinya bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia.

Sepanjang tahun 2023, KLHK telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan penganggaran. Dalam rangka mengantisipasi kondisi geopolitik global, Pemerintah kembali melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) di tahun 2023 melalui mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja K/L TA 2023 yang bersumber dari Rupiah Murni pada Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Besaran AA untuk KLHK yakni di angka Rp458.603.392.000,-.

Pada triwulan pertama TA 2023, KLHK mendapatkan ABT PNPB PKH pada Ditjen PKTL total sebesar Rp418.590.000.000,- untuk percepatan pencapaian target prioritas pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Dukungan Manajemen. Pada triwulan ini, terdapat *top up* HLN pada Ditjen KSDAE total sebesar Rp16.847.286.000,-

Dinamika anggaran pada triwulan kedua tahun 2023 diantaranya *top up* HLN pada Ditjen PSKL, Ditjen PHL, dan Ditjen PPI total sebesar Rp16.972.898.000,-; *top up* HLLN pada BSILHK dan Ditjen PPKL total sebesar Rp10.791.630.000,-serta ABT PNPB pada Ditjen PHLHK (PNBP Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan LH dan PNPB Denda Administrasi Bidang Kehutanan) total sebesar Rp197.241.510.000,- yang dialokasikan pada Ditjen PHLHK, BP2SDM, Ditjen KSDAE, Ditjen PSKL, dan Ditjen PPKL.

Pada triwulan ketiga, arahan untuk realokasi pagu blokir AA belanja pegawai total sebesar Rp62.244.002.000,- ke BA BUN telah dilaksanakan. Pada rentang waktu ini juga, terdapat *top up* HLN pada Ditjen KSDAE, Ditjen PPI, dan Ditjen PSKL total sebesar Rp19.603.066.000,- dan *top up* HLLN pada Ditjen PPI dan BSILHK total sebesar Rp3.956.494.000,-. Selanjutnya, KLHK melakukan realokasi anggaran dari Setjen ke BP2SDM sebesar Rp2.296.180.000,- untuk orientasi PPPK hasil pengadaan tahun 2022 serta realokasi anggaran dari Itjen ke BP2SDM sebesar Rp2.168.333.000,- untuk pelatihan terkait pengendalian karhutla bagi Manggala Agni dan MPA dalam rangka memenuhi arahan persetujuan relaksasi pagu blokir AA non Belanja Pegawai.

Sebelum batas akhir waktu revisi anggaran tahun 2023 yang menjadi kewenangan Ditjen Anggaran Kemenkeu, arahan untuk realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai total sebesar Rp289.400.299.000,- ke BA BUN telah dilaksanakan. Selain itu, terdapat *top up* HLLN pada Ditjen PPKL sebesar Rp4.350.211.000,- dan *top up* PNPB pada Ditjen PHL sebesar Rp1.389.000.000,-. Untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai di beberapa UKE I pada triwulan terakhir, KLHK melakukan dua kali realokasi anggaran belanja pegawai. Realokasi pertama dilakukan dari BSILHK kepada Ditjen PHL, Ditjen KSDAE, Ditjen PSKL, Ditjen PSLB3, dan Ditjen PPKL total sebesar Rp11.343.483.000,-. Sedangkan realokasi kedua diberikan dari BSILHK kepada BP2SDM, Ditjen KSDAE, dan Ditjen PHL dengan total sebesar Rp4.179.800.000. Terdapat juga *top up* HLLN dan HLN terencana pada Ditjen PPI masing-masing sebesar Rp9.062.988.000,- dan Rp252.870.000,-. Dalam rangka persiapan pelaksanaan proyek *Indonesia Mangrove for Climate Coastal Resilience* (M4CR), BRGM memperoleh tambahan pagu sebesar Rp6.333.990.000,-.

Selanjutnya, menyikapi berbagai perubahan kebijakan fiskal di atas, KLHK hendak melengkapi kisah pembangunan tahun 2023 dengan penyesuaian sasaran dan kinerja dengan tetap berorientasi kepada pencapaian *outcome* yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Beberapa penyesuaian kinerja diantaranya panjang tata batas kawasan hutan dari semula 40.534 km menjadi 44.974 km; luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA dari semula 10,100 ribu hektar menjadi 21,240 ribu hektar; kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani dari semula 250 kasus menjadi 480 kasus; luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari semula 300.00 hektar menjadi 600.000 hektar; kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla dari semula 970 kelompok menjadi 1.200 kelompok; upaya penanggulangan karhulta melalui pemadaman darat dari semula 1.200 operasi menjadi 1.546 operasi; dan pengawasan ketaatan hukum LHK oleh badan usaha dari semula 750 badan usaha menjadi 1.048 badan usaha.

Sepanjang tahun 2023, pagu KLHK mengalami perubahan dari semula sebesar Rp6.912.784.958.000,- menjadi Rp7.266.132.608.000,- atau naik sebesar 5,11% per 22 Desember 2023.

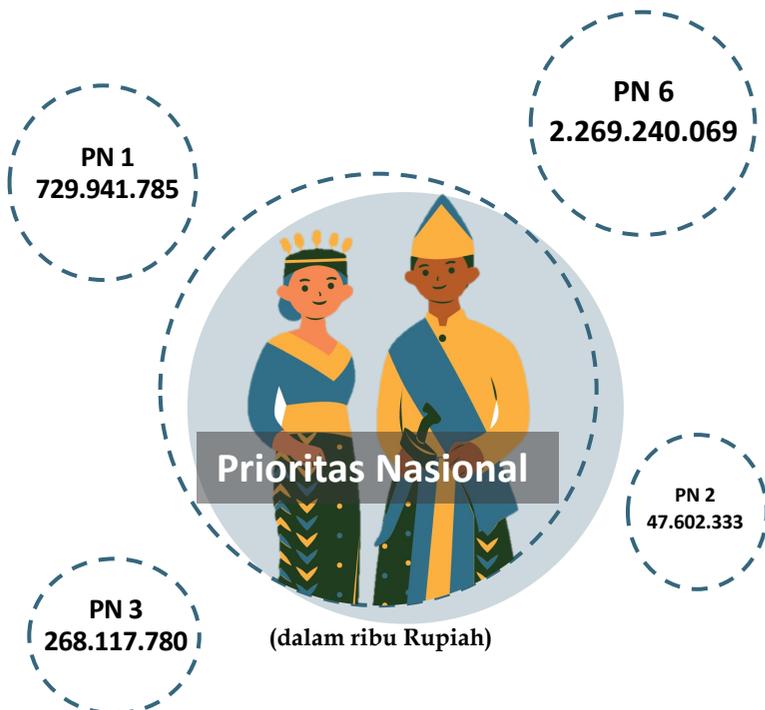
Pada akhirnya, Rencana Kerja Tahun 2023 (Revisi) diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan LHK tahun 2023.

KEMENTERIAN LHK DALAM ANGKA (REVISI)

DUKUNGAN UNTUK PRIORITAS NASIONAL

Rp3,31 Triliun

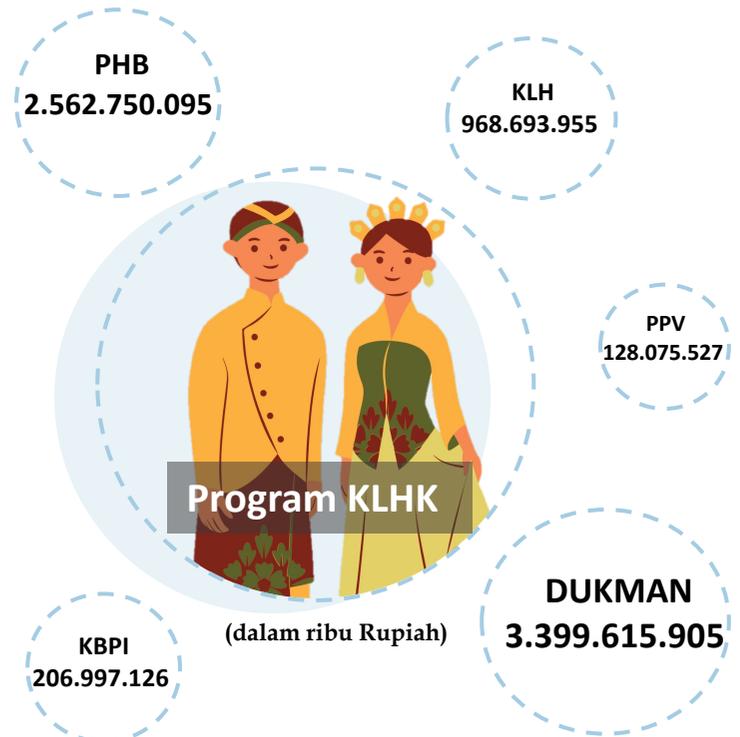
PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	22,02%
PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1,44%
PN 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	8,09%
PN 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	68,46%



ANGKA MENURUT PROGRAM

Rp7,27 Triliun

46,79%	Dukungan Manajemen
35,27%	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
13,33%	Kualitas Lingkungan Hidup
2,85%	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
1,76%	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi



Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia



PILAR LINGKUNGAN

17,33 %
Persentase Penurunan
emisi GRK dari sektor
limbah dan kehutanan

67 poin
Indeks Kinerja
Pengelolaan Sampah

69,48 poin
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

0,2 juta hektar
Laju deforestasi
dan degradasi hutan



PILAR SOSIAL

16,4 juta hektar
Luas kawasan hutan
dengan status penetapan

21,240 ribu ha
Luas hutan yang
dilepaskan untuk TORA

150.000 ha
Luas kawasan hutan
yang dikelola oleh
masyarakat



PILAR EKONOMI

Rp. **118** triliun
Kontribusi sektor
Kehutanan terhadap PDB
Nasional (berdasarkan
harga berlaku)

Rp. **14,1** triliun
Kontribusi sektor LH
Terhadap PDB Nasional
(berdasarkan harga berlaku)

US\$ **15** miliar
Nilai ekspor hasil hutan,
TSL dan bioprospecting

Rp. **5,26** triliun
Nilai PNBP
Fungsional KLHK



PILAR TATA KELOLA

78 poin
Indeks produktivitas
dan daya saing
SDM LHK

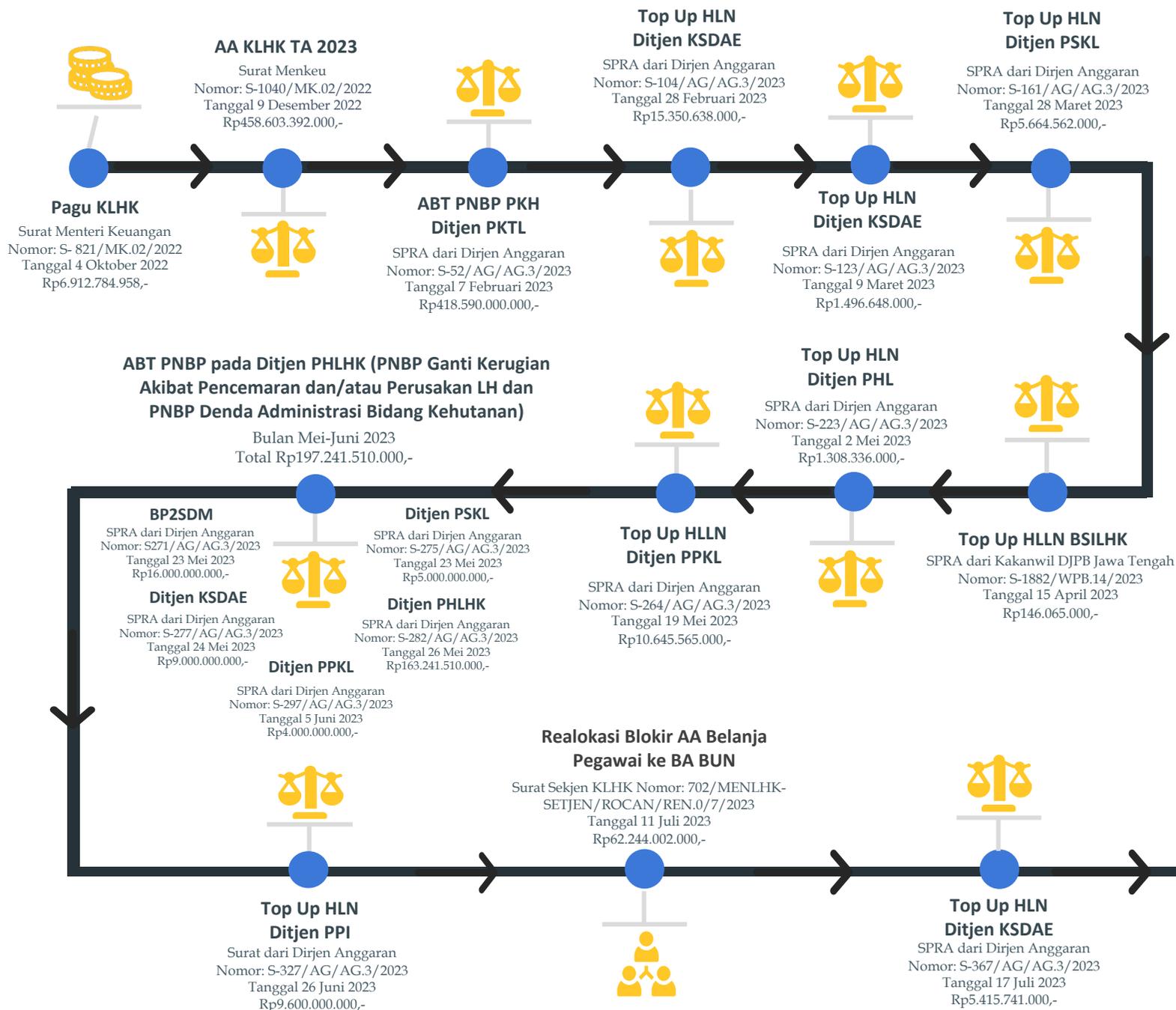
83 poin
Nilai kinerja
reformasi birokrasi



PERJALANAN PERUBAHAN PAGU KEMENTERIAN LHK 2023

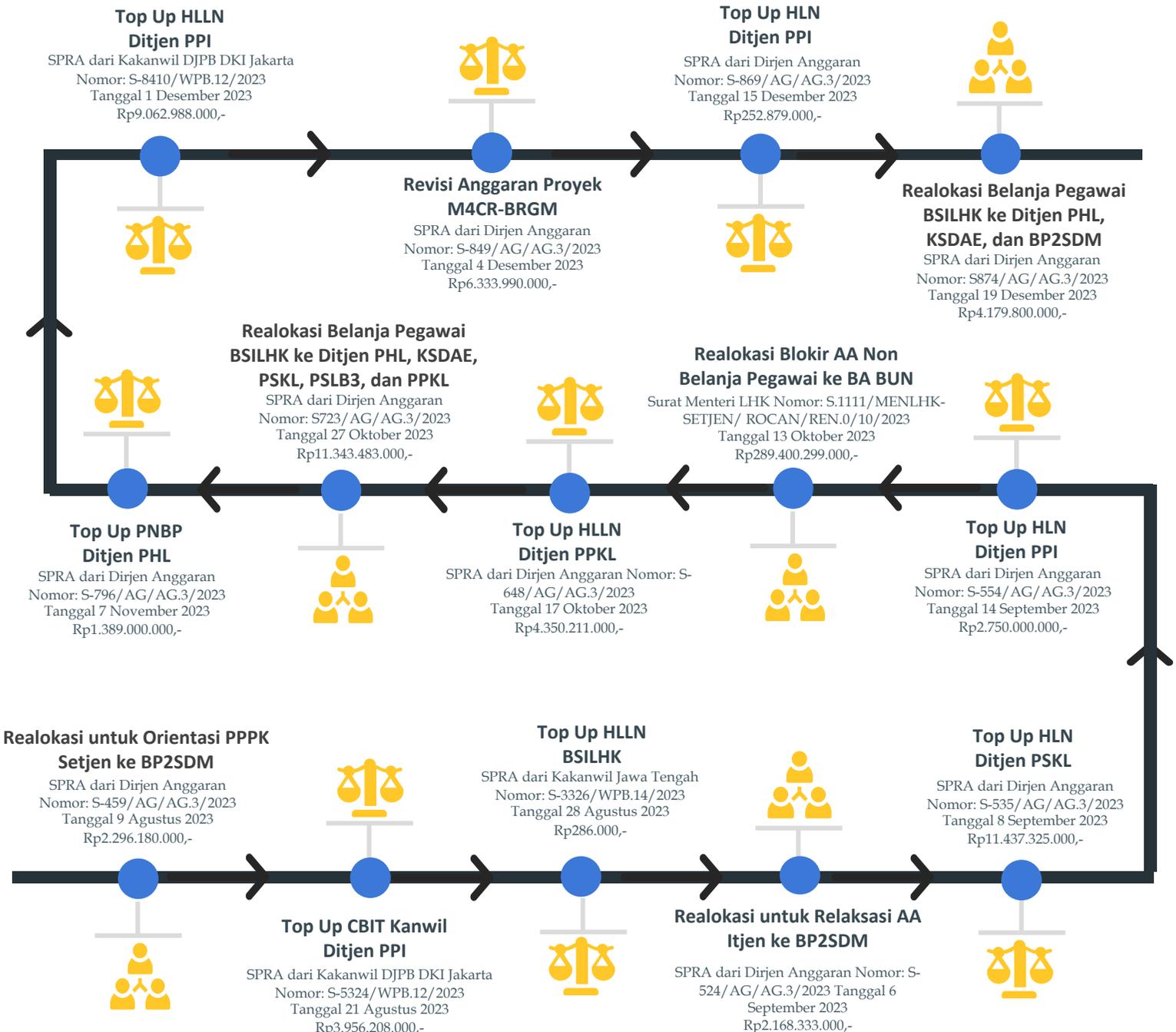


PERJALANAN PERUBAHAN



Gambar 1. Perjalanan Perubahan

PAGU KEMENTERIAN LHK 2023



Masa pemulihan pandemi telah berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun 2022 Kementerian berusaha menggunakannya sebagai momentum penataan cara kerja birokrasi sekaligus membuktikan bahwa birokrasi Kementerian adalah birokrasi yang gesit dan tanggap terhadap perubahan jaman. Arah pembangunan LHK tahun 2022 adalah memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi birokrasi. Sedangkan tahun 2023 diharapkan menjadi titik balik sumbangsih Kementerian LHK bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia. Ukuran keberhasilannya yakni keberdayaan masyarakat merata dan produktivitas di tingkat tapak dan peningkatan derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk bergulirnya ekonomi sirkular dan sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022, dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran KLHK TA. 2023 sebesar **Rp6.912.784.958.000,-**.

Mempertimbangkan kondisi geopolitik global, Pemerintah kembali melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment (AA) di tahun 2023* dengan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja K/L TA 2023. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022, besaran AA untuk KLHK adalah **Rp458.603.392.000,-** dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp62.244.000.000,-; Belanja Barang sebesar Rp352.546.662.000; dan Belanja Modal sebesar Rp43.812.730.000,-. KLHK melakukan blokir sementara pada belanja modal dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kurang mendesak dan pada belanja barang terutama jenis belanja 524 (perjalanan dinas dan paket meeting). Blokir sementara pada belanja pegawai dilakukan dengan memperhitungkan potensi kelebihan belanja pegawai.

Perubahan pagu KLHK TA 2023 dimulai pada bulan Februari 2023. Persetujuan atas usulan persetujuan penggunaan sebagian **PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)** pada Ditjen PKTL telah disahkan melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-52/AG/AG.3/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebesar **Rp418.590.000.000,-**.

Pada bulan yang sama terdapat penambahan pagu belanja lingkup Ditjen KSDAE melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-104/AG/AG.3/2023 tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp15.350.638.000,- yang bersumber dari dana HLN pada Proyek *Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE)*.

Pada bulan Maret 2023, diperoleh penambahan pagu belanja lingkup Ditjen KSDAE melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-123/AG/AG.3/2023 tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp1.496.648.000,- yang bersumber dari dana HLN pada Proyek *Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (Forest Investment Program-FIP I)*. Masih di bulan yang sama, Ditjen PSKL juga memperoleh tambahan pagu yang bersumber dari dana HLN Proyek *Community focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (Forest Investment Program-FIP I)* melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-161/AG/AG.3/2023 tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp5.664.562.000,-.

Pada bulan April 2023, BSILHK memperoleh tambahan pagu melalui SPRA Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor S-1882/WPB.14/2023 tanggal 15 April 2023 sebesar Rp146.065.000,- yang bersumber dari pencatatan Hibah Luar Negeri Langsung (HLLN).

Pada bulan Mei 2023, Ditjen PHL memperoleh tambahan pagu melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-223/AG/AG.3/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebesar Rp1.308.336.000,- yang bersumber dari dana HLN proyek *Forest Investment Program-I (FIP I)*. Di bulan yang sama, terdapat penambahan anggaran pada Ditjen PPKL melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-264/AG/AG.3/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebesar Rp10.645.565.000,- yang bersumber dari pencatatan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN).



Selanjutnya, persetujuan penggunaan dana **PNBP lingkup Ditjen PHLHK** total sebesar **Rp197.241.510.000,-** yang didistribusikan ke beberapa UKE I telah disahkan yaitu: BP2SDM melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor: S-271/AG/AG.3/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp16.000.000.000,-; Ditjen PSKL melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor: S-275/AG/AG.3/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp5.000.000.000,-; Ditjen KSDAE melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-277/AG/AG.3/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp9.000.000.000,-; Ditjen PHLHK melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-282/AG/AG.3/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp163.241.510.000,-; dan Ditjen PPKL melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-297/AG/AG.3/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp4.000.000.000,-.

Pada bulan Juni 2023, usulan revisi anggaran (*top up*) HLN pada Ditjen PPI sebesar Rp9.600.000.000,- pada proyek *Hydrochlorofluorocarbon Phase-out in the Polyurethane Foam Sector* (HCFC) telah disahkan melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-327/AG/AG.3/2023 tanggal 26 Juni 2023

Pada bulan Juli 2023, berdasarkan surat Menkeu Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 terdapat **realokasi anggaran blokir AA belanja pegawai ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)** pada semua UKE I total sebesar **Rp62.244.002.000,-** yang ditindaklanjuti melalui surat Sekjen an. Menteri LHK Nomor 701/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/7/2023 tanggal 11 Juli 2023. Pada bulan ini juga, Ditjen KSDAE memperoleh penambahan anggaran yang bersumber dari HLN pada Proyek *Forest Programme II (Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management)* dan *Forest Programme III - Sulawesi* sebesar Rp5.415.741.000,- melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-367/AG/AG.3/2023 tanggal 17 Juli.

Pada bulan Agustus 2023, terdapat revisi anggaran dari Sekretariat Jenderal ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) sebesar Rp2.296.180.000,- untuk orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-459/AG/AG.3/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

Pada bulan yang sama, Ditjen PPI melakukan revisi penambahan anggaran yang berasal dari dana HLLN pada Proyek CBIT Indonesia (*Capacity Building Initiative for Transparency*) sebesar Rp3.956.208.000,- melalui SPRA Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-5324/WPB.12/2023 tanggal 21 Agustus 2023. Pada akhir bulan Agustus 2023, Badan Standardisasi Instrumen (BSI) LHK melakukan *top up* HLLN sebesar Rp286.000,- melalui SPRA Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor S-3326/WPB.14/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Untuk mengantisipasi dampak El Nino terkait pengendalian karhutla, pengurangan kantung kemiskinan akibat perubahan iklim, dan meningkatkan nilai investasi daur ulang sampah dan investasi bidang kehutanan termasuk wisata alam di kawasan hutan, KLHK mengusulkan relaksasi/pemanfaatan blokir anggaran AA total sebesar Rp396.359.390.000,- melalui surat Sekjen an. Menteri LHK Nomor S.926/SETJEN/ROCAN/REN.2/8/2023 tanggal 11 Agustus 2023. Usulan tersebut ditanggapi Kementerian Keuangan melalui surat Menkeu Nomor S-286/MK.2/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dimana total sebesar Rp106.959.091.000,- dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Atas tanggapan Kementerian Keuangan tersebut, pada bulan September 2023 diperlukan pergeseran pagu belanja pada Inspektorat Jenderal (Itjen) ke BP2SDM sebesar Rp2.168.333.000,- sesuai dengan SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-524/AG/AG.3/2023 tanggal 6 September 2023 untuk pelatihan terkait pengendalian karhutla bagi Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Selanjutnya, Ditjen PSKL melakukan *top up* HLN melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-535/AG/AG.3/2023 tanggal 8 September 2023 dengan total sebesar Rp11.437.325.000,- untuk 2 (dua) proyek yaitu proyek *Strengthening of Social Forestry in Indonesia* (SSF) sebesar Rp9.477.140.000 dan *Forest Programme III* (FP III) sebesar Rp1.960.185.500,-. Pada bulan ini juga, Ditjen PPI melakukan revisi berupa penambahan pagu (*top up*) HLN sebesar Rp2.750.000.000,- pada proyek *Pre-Investment BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape - Jambi Sustainable Landscape Management Project* melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-554/AG/AG.3/2023 tanggal 14 September 2023.

Pada bulan Oktober 2023, berdasarkan surat Menkeu Nomor S-371/MK.02/2023 tanggal 10 Oktober 2023 terdapat arahan tindak lanjut penyelesaian relaksasi non belanja pegawai dari AA belanja K/L TA 2023 untuk melakukan **realokasi anggaran blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN** pada semua UKE I total sebesar **Rp289.400.299.000,-** melalui surat Sekjen an. Menteri LHK Nomor S.1111/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Selanjutnya, Ditjen PPKL memperoleh tambahan pagu belanja yang bersumber dari dana HLLN sebesar Rp4.350.211.000,- melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-648/AG/AG.3/2023 pada tanggal 17 Oktober 2023.

Pada bulan yang sama, untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai pada beberapa UKE I lingkup KLHK, dilakukan realokasi anggaran dari BSI LHK sebesar Rp11.343.483.000,- yang disahkan melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-723/AG/AG.3/2023 tanggal 27 Oktober 2023. Realokasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen tersebut didistribusikan kepada: Ditjen PHL sebesar Rp1.396.742.000,-; Ditjen KSDAE sebesar Rp4.072.774.000,-; Ditjen PSKL sebesar Rp4.243.658.000,-; Ditjen PSLB3 sebesar Rp1.327.436.000,-; dan Ditjen PPKL sebesar Rp302.873.000,-.

Pada bulan November 2023, Ditjen PHL melakukan revisi penambahan pagu belanja sumber dana PNPB TA. 2023 sebesar Rp1.389.000.000,- melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-796/AG/AG.3/2023 pada tanggal 7 November 2023.

Pada bulan Desember 2023, Ditjen PPI memperoleh tambahan pagu melalui SPRA Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-8410/WPB.12/2023 tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp9.062.988.000,- yang bersumber dari pencatatan Hibah Luar Negeri Langsung (HLLN).

Selanjutnya, dalam rangka persiapan pelaksanaan proyek *Mangroves for Coastal Resilience* (M4CR), BRGM memperoleh tambahan pagu sebesar Rp6.333.990.000,- yang disahkan melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-849/AG/AG.3/2023 pada tanggal 4 Desember 2023.

Pada pertengahan bulan ini, Ditjen PPI melakukan *top up* HLN terencana akibat selisih kurs pada proyek *Hydrochlorofluorocarbon Phase-out in the Polyurethane Foam Sector* (HCFC) TA 2023 sebesar Rp252.879.000,- yang disahkan melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-869/AG/AG.3/2023 tertanggal 15 Desember 2023.

Pada bulan yang sama, dilakukan realokasi anggaran belanja pegawai dari BSI LHK yang kedua kepada beberapa UKE I total sebesar Rp4.179.800.000,- yang disahkan melalui SPRA Dirjen Anggaran Nomor S-874/AG/AG.3/2023 tanggal 19 Desember 2023. Rincian realokasi anggaran tersebut yaitu: Ditjen PHL sebesar Rp1.654.800.000,-; Ditjen KSDAE sebesar Rp1.525.000.000,-; dan BP2SDM sebesar Rp1.000.000.000,-.

Dengan adanya realokasi pagu blokir AA belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal ke BA BUN, penambahan pagu atas persetujuan penggunaan PNPB, pergeseran dan penambahan anggaran dalam kurun waktu satu tahun anggaran, telah terjadi perubahan anggaran KLHK TA 2023 dari **semula sebesar Rp6.912.784.958.000,- menjadi Rp7.266.132.608.000,- atau naik sebesar 5,11% per 22 Desember 2023.**



PERUBAHAN KINERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA ESELON I KEMENTERIAN LHK TAHUN ANGGARAN 2023



PERUBAHAN PAGU PER UKE I

Tabel 1. Perubahan Pagu per UKE I Lingkup Kementerian LHK TA 2023

NO	UNIT KERJA ESELON I	PAGU AWAL	PENYESUAIAN		
			REALOKASI BELANJA PEGAWAI (KE BA BUN)	REALOKASI NON BELANJA PEGAWAI (KE BA BUN)	REALOKASI BELANJA PEGAWAI (ANTAR UKE I)
1	SEKRETARIAT JENDERAL	457.728.759.000	(3.834.893.000)	(12.677.553.000)	
2	INSPEKTORAT JENDERAL	91.830.528.000	(719.626.000)	(4.374.698.000)	
3	DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	252.624.634.000	(3.348.936.000)	(5.367.416.000)	3.051.542.000
4	DITJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN	1.364.201.647.000	(8.389.145.000)	(27.338.521.000)	
5	DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.667.784.111.000	(20.935.188.000)	(27.138.098.000)	5.597.774.000
6	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	602.644.047.000	(6.599.754.000)	(128.695.659.000)	
7	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	262.940.688.000	(5.955.101.000)	(3.959.471.000)	(15.523.283.000)
8	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	296.154.950.000	(2.097.767.000)	(10.298.371.000)	1.000.000.000
9	DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	299.522.348.000	(841.514.000)	(6.608.676.000)	4.243.658.000
10	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	354.211.103.000	(6.354.222.000)	(15.343.144.000)	
11	DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	290.083.360.000	(1.631.853.000)	(2.514.700.000)	
12	DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	203.784.773.000	(216.608.000)	(16.968.998.000)	1.327.436.000
13	DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	393.075.629.000	(228.323.000)	(15.591.933.000)	302.873.000
14	BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE	376.198.381.000	(1.091.072.000)	(12.523.062.000)	
JUMLAH		6.912.784.958.000	(62.244.002.000)	(289.400.300.000)	0

LINGKUP KEMENTERIAN LHK TA. 2023

(dalam rupiah)

ANGGARAN TA 2023					
REALOKASI ORIENTASI PPPK	TOP UP PNBP	TOP UP HLN	REALOKASI RELAKSASI AA	PROYEK M4CR (RM)	PAGU AKHIR
(2.296.180.000)					438.920.133.000
			(2.168.333.000)		84.567.871.000
	1.389.000.000	1.308.336.000			249.657.160.000
					1.328.473.981.000
	9.000.000.000	22.263.027.000			1.656.571.626.000
	418.590.000.000				885.938.634.000
		146.351.000			237.649.184.000
2.296.180.000	16.000.000.000		2.168.333.000		305.223.325.000
	5.000.000.000	17.101.887.000			318.417.703.000
	163.241.510.000				495.755.247.000
		25.622.075.000			311.558.882.000
					187.926.603.000
	4.000.000.000	14.995.776.000			396.554.022.000
				6.333.990.000	368.918.237.000
0	617.220.510.000	81.437.452.000	0	6.333.990.000	7.266.132.608.000

SEKRETARIAT JENDERAL

Pagu Rp438.920.133.000,-



■ Program Dukungan Manajemen

Setjen melaksanakan Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp457.728.759.000,- Setjen melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp3.834.893.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp12.677.553.000,-; dan realokasi anggaran ke BP2SDM sebesar Rp2.296.180.000,- untuk orientasi PPPK hasil pengadaan tahun 2022.

KINERJA YANG DIHARAPKAN



340 Poin

Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLHK



30 Dokumen

Jumlah Dokumen Kerjasama



4 Poin

Opini terhadap laporan keuangan KLHK



3,65 Poin

Indeks Sistem pemerintah Berbasis Elektronik



4 Poin

Survei Kepuasan Publik



77,5 Poin

Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK



86 Poin

Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK



78 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



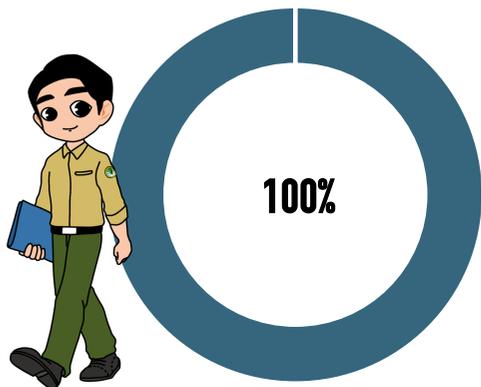
5 Poin

Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan

Gambar 2. *Highlight* Kinerja Sekretariat Jenderal

INSPEKTORAT JENDERAL

Pagu Rp84.567.871.000,-



■ Program Dukungan Manajemen

Itjen melaksanakan Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp91.830.528.000,- Itjen melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp719.626.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp4.374.698.000,-; dan realokasi anggaran dalam rangka memenuhi persetujuan relaksasi AA ke BP2SDM sebesar Rp2.168.333.000,- untuk pelatihan pencegahan dan pengendalian karhutla bagi Manggala Agni (MA) dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

KINERJA YANG DIHARAPKAN



3 Poin

Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK



3 Poin

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK



3,3 Poin

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KLHK



85 Poin

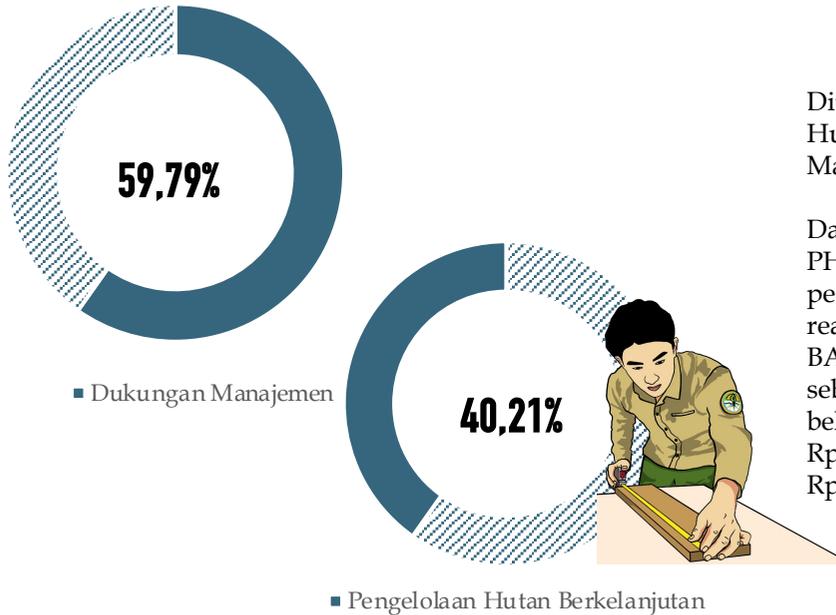
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal



3,3 Poin

Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Gambar 3. *Highlight* Kinerja Inspektorat Jenderal



Ditjen PHL melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp252.624.634.000,- Ditjen PHL melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp3.489.360.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp5.367.416.000,-; *Top Up* PNBPNP sebesar Rp1.389.000.000,-; realokasi anggaran belanja pegawai dari BSI LHK total sebesar Rp3.051.542.000,-; dan *Top Up* HLN sebesar Rp1.308.336.000,-.

KINERJA YANG DIHARAPKAN



428.000 Ha

Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan



3,233 Triliun Rupiah

Nilai PNBPNP dari Pemanfaatan Hutan



57 Juta m³

Jumlah Produksi Kayu Bulat



15.000 ha

Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat



10 Miliar US\$

Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan



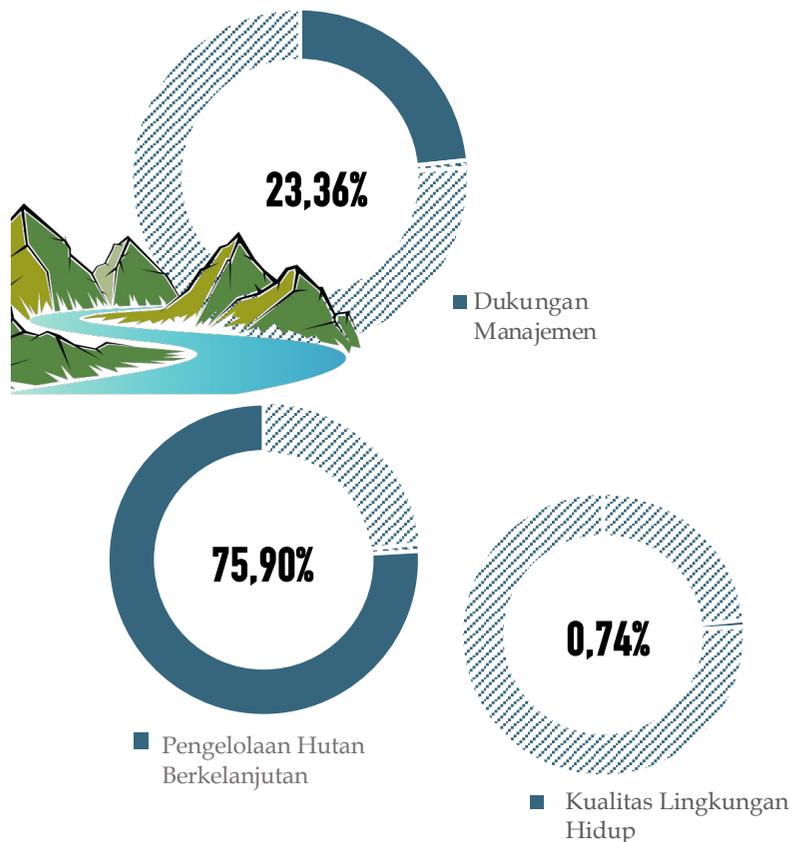
82 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

Gambar 4. *Highlight* Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

DITJEN PDASRH

Pagu Rp1.328.473.981.000,-



Ditjen PDASRH melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp1.364.201.647.000,- Ditjen PDASRH melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp8.389.145.000,-; dan realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp27.338.521.000,-.

KINERJA YANG DIHARAPKAN



15 Danau

Pengendalian Kerusakan Danau Prioritas Nasional



14.025 Ha

Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi



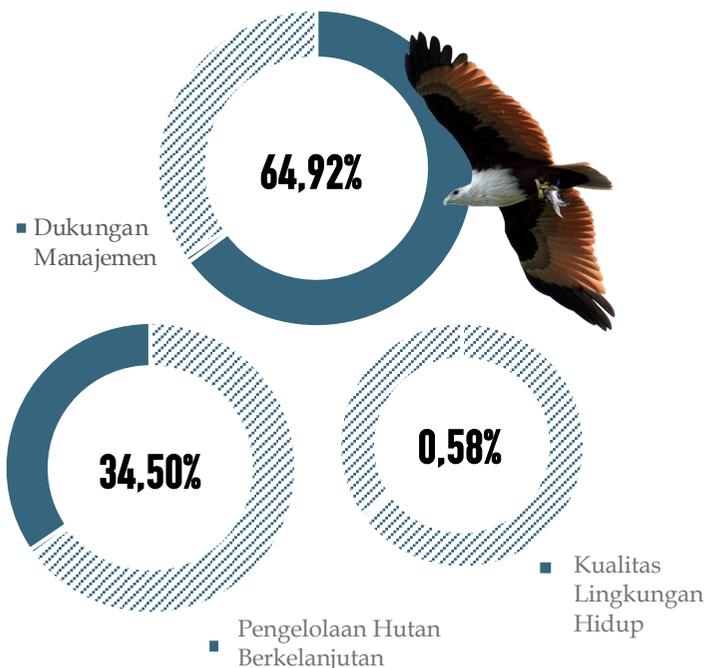
78 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan

Gambar 5. *Highlight* Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan

DITJEN KSDAE

Pagu Rp1.656.571.626.000,-



Ditjen KSDAE melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp1.667.784.111.000,- Ditjen KSDAE melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp20.935.188.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp27.138.098.000,-; mendapatkan ABT PNPB pada Ditjen PHLHK sebesar Rp9.000.000.000,-; realokasi anggaran belanja pegawai dari BSI LHK total sebesar Rp5.597.774.000,-; dan *Top up* pagu HLN total sebesar Rp22.263.027.000,-.

KINERJA YANG DIHARAPKAN



10.000.000 Ha

Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi



12.000.000 Ha

Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif



2,15 Triliun Rupiah

Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan



230 Milyar Rupiah

Nilai PNPB Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari



1.000 Desa

Desa di Kawasan Konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat



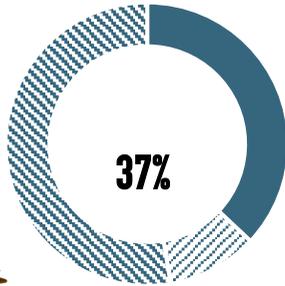
78 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Ekosistem

Gambar 6. *Highlight* Kinerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

DITJEN PKTL

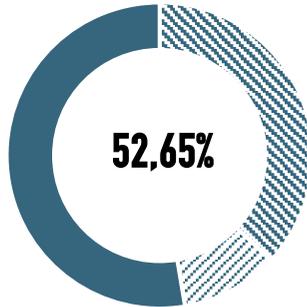
Pagu Rp885.938.634.000,-



■ Dukungan Manajemen



■ Kualitas Lingkungan Hidup



■ Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Ditjen PKTL melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp1.014.634.293.000,- Ditjen PKTL melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp6.599.754.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp128.695.659.000,-; dan ABT PNBP PKH sebesar Rp418.590.000.000,-.

KINERJA YANG DIHARAPKAN



583 Layanan

Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



33 Layanan

Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

31 Layanan

Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan



300 Pemohon

Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



16,4 Juta Ha

Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)



21,240 Ribu Ha

Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA



156 Dokumen

Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan



296 Laporan

Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan



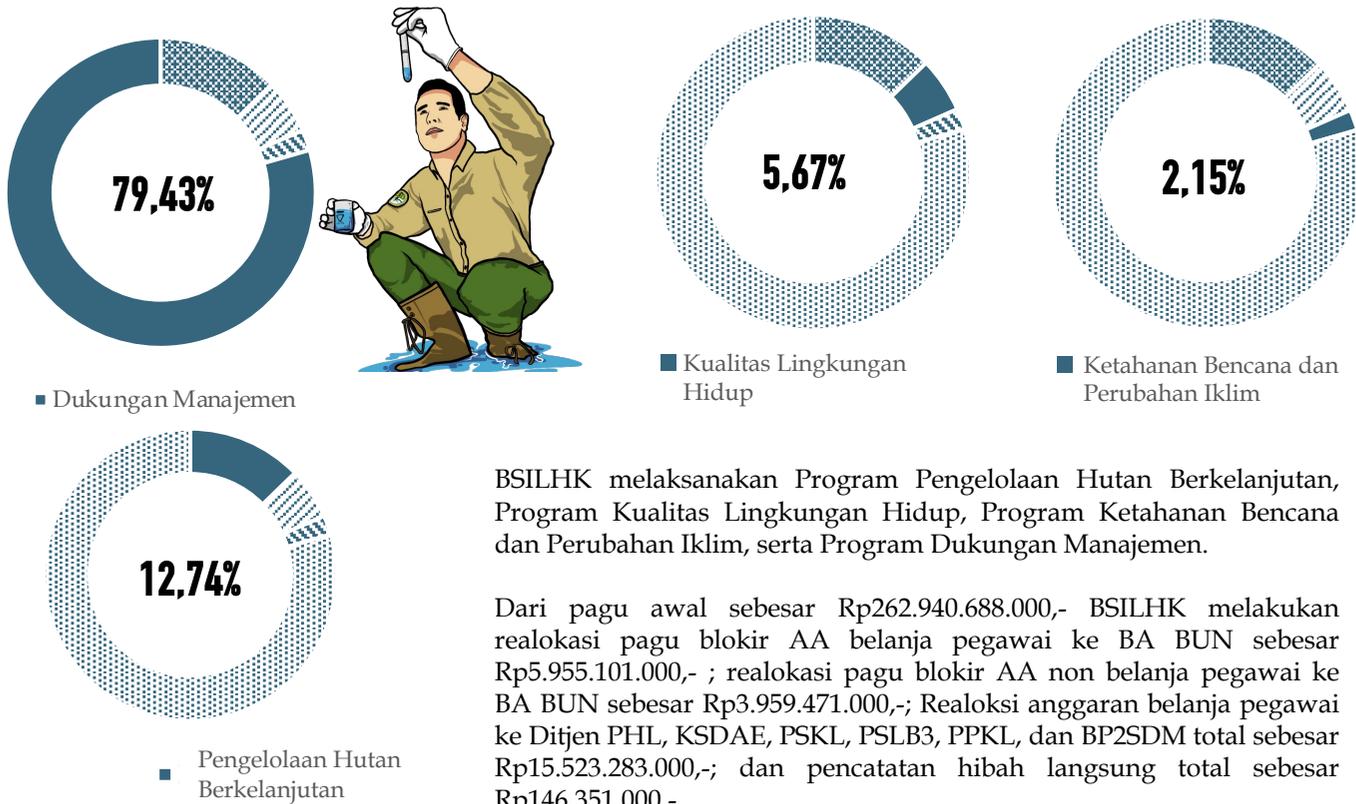
82 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Gambar 7. Highlight Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LHK

Pagu Rp237.649.184.000,-



BSILHK melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp262.940.688.000,- BSILHK melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp5.955.101.000,- ; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp3.959.471.000,-; Realoksi anggaran belanja pegawai ke Ditjen PHL, KSDAE, PSKL, PSLB3, PPKL, dan BP2SDM total sebesar Rp15.523.283.000,-; dan pencatatan hibah langsung total sebesar Rp146.351.000,-

KINERJA YANG DIHARAPKAN



75 Lembaga

Jumlah penerapan standar instrumen kualitas lingkungan hidup



26 NSPK

Jumlah standar dan instrumen investasi di bidang lingkungan hidup



10 NSPK

Jumlah standar dan instrumen investasi di bidang kehutanan



7 NSPK

Jumlah standar dan instrumen investasi di bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim



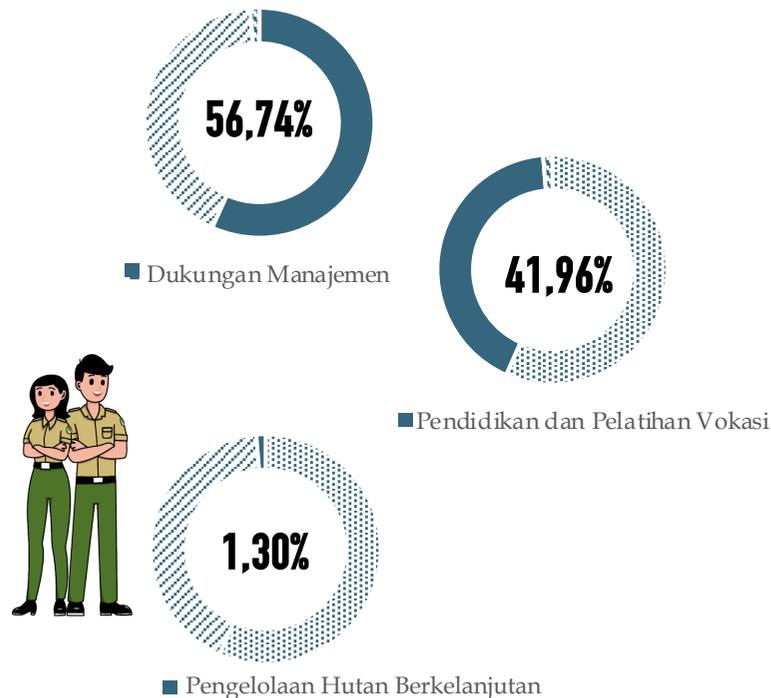
78 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 8. Highlight Kinerja Badan Standardisasi Instrumen LHK

BP2SDM

Pagu Rp305.223.325.000,-



BP2SDM melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp296.154.950.000,- BP2SDM melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp2.097.767.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp10.298.371.000,-; mendapatkan ABT PNPB pada Ditjen PHLHK sebesar Rp16.000.000.000,- untuk pelatihan pembentukan Polhut dan PPLH, realokasi anggaran dari Setjen sebesar Rp2.296.180.000,- untuk pelaksanaan orientasi PPPK, realokasi anggaran dari Itjen sebesar Rp2.168.333.000,- untuk pelatihan terkait pengendalian karhutla bagi Manggala Agni dan MPA; dan realokasi anggaran belanja pegawai dari BSI LHK sebesar Rp1.000.000.000,-.

KINERJA YANG DIHARAPKAN



6.354 Orang

SDM LHK yang meningkat kompetensinya



472 Orang

Jumlah Lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat



69 Poin

Indeks efektivitas pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan



247 Lembaga

Lembaga/Komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup



0,3 Triliun Rupiah

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan



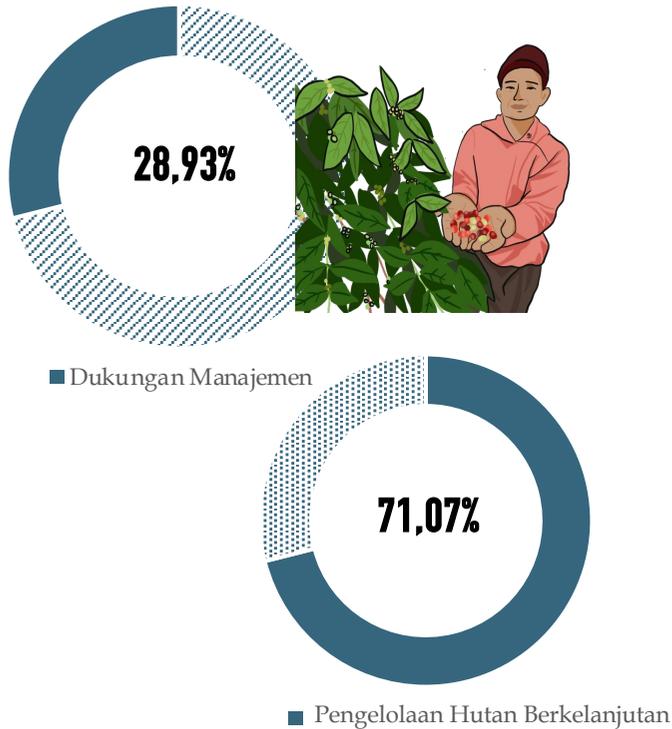
78 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Gambar 9. *Highlight* Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

DITJEN PSKL

Pagu Rp318.417.703.000,-



Ditjen PSKL melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp299.522.348.000,- Ditjen PSKL melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp841.514.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp6.608.676.000,-; mendapatkan ABT PNBPN lingkup Ditjen PHLHK sebesar Rp5.000.000.000,-; realokasi anggaran belanja pegawai dari BSI LHK sebesar Rp4.243.658.000,-; dan *Top up* pagu HLN total sebesar Rp17.101.887.000,-.

KINERJA YANG DIHARAPKAN



152.000 Ha

Optimalisasi akses kelola perhutanan sosial



1,1 Triliun Rupiah

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial



150.000 Ha

Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat



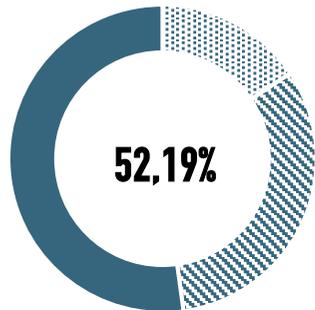
74 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

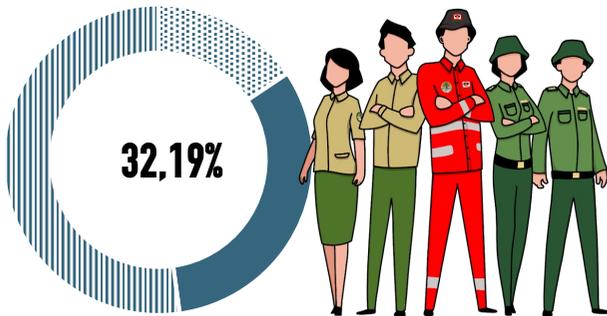
Gambar 10. *Highlight* Kinerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

DITJEN PHLHK

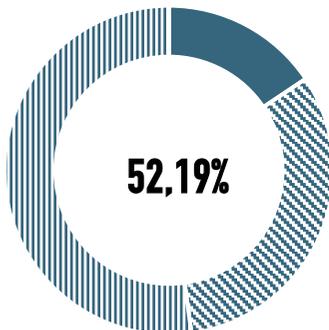
Pagu Rp495.755.247.000,-



■ Dukungan Manajemen



■ Kualitas Lingkungan Hidup



■ Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Ditjen PHLHK melaksanakan Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp299.522.348.000,- Ditjen PHLHK melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp6.354.222.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp15.343.144.000,-; dan ABT PNBPN pada Ditjen PHLHK sebesar Rp163.241.510.000,-.

KINERJA YANG DIHARAPKAN



51 Persen

Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan



480 Kasus

Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani



600.000 Ha

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman



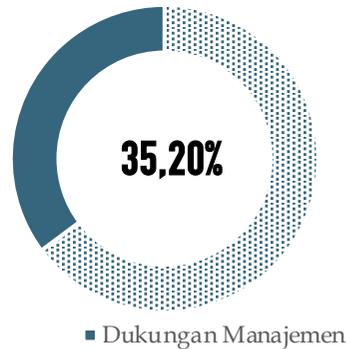
78 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 11. *Highlight* Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DITJEN PPI

Pagu Rp311.558.882.000,-



Ditjen PPI melaksanakan Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp290.083.360.000,- Ditjen PPI melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp1.631.853.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp2.514.700.000,-; serta *Top up* pagu HLLN dan HLN total sebesar Rp25.622.075.000,-.

KINERJA YANG DIHARAPKAN



3 Dokumen

Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK Nasional dan *non party stakeholder* di bidang pengendalian perubahan iklim



6.500 Desa

Jumlah wilayah yang berketahanan iklim



3 Dokumen

Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen Kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai pelaksanaan peran NFP



1 Dokumen

Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim untuk 5 sektor



95,94 ODP Ton

Penurunan konsumsi bahan perusak ozon



2 Persen

Penurunan luas areal kebakaran lahan hutan



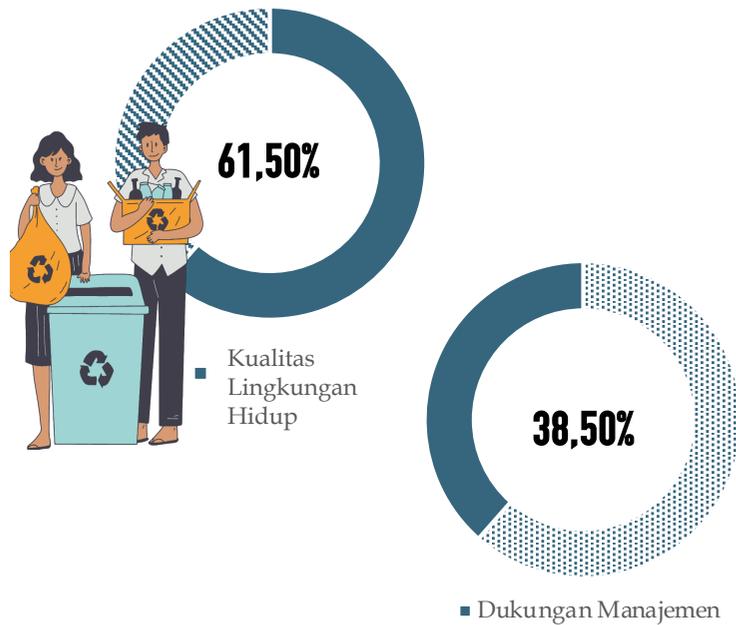
78 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim

Gambar 12. *Highlight* Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

DITJEN PSLB3

Pagu Rp187.926.603.000,-



Ditjen PSLB3 melaksanakan Program Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp203.784.773.000,- Ditjen PSLB3 melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp216.608.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp16.968.998.000,-; dan realokasi anggaran belanja pegawai dari BSI LHK sebesar Rp1.327.436.000,-.

KINERJA YANG DIHARAPKAN



6.000.000 Ton

Jumlah B3 yang dikelola



20,84 Triliun Rupiah

Jumlah nilai ekonomi pengelolaan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3



33.629.101 Ton

Jumlah limbah B3 yang dikelola



4.921.472.000 Rupiah

Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah



15.633.622 Ton

Jumlah sampah yang dikelola



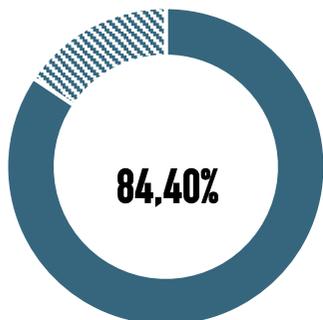
78 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PSLB3

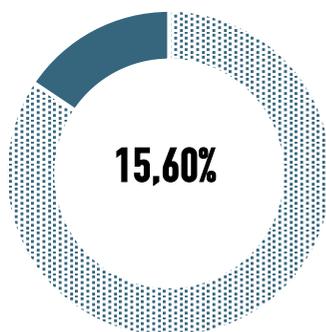
Gambar 13. *Highlight* Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

DITJEN PPKL

Pagu Rp396.554.022.000,-



■ Kualitas Lingkungan Hidup



■ Dukungan Manajemen

Ditjen PPKL melaksanakan Program Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp393.075.629.000,- Ditjen PPKL melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp228.323.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp15.591.933.000,-; mendapatkan ABT PNPB lingkup Ditjen PHLHK sebesar Rp4.000.000.000,-; realokasi anggaran belanja pegawai dari BSI LHK sebesar Rp302.873.000,-; dan pencatatan pagu HLLN total sebesar Rp14.995.776.000,-.

KINERJA YANG DIHARAPKAN



84,4 Poin

Nilai Indeks Kualitas Udara



64,5 Poin

Nilai Indeks Kualitas Lahan



55,4 Poin

Nilai Indeks Kualitas Air



16 Perusahaan

Unit Usaha Pemanfaatan Air Limbah



60 Poin

Nilai Indeks Kualitas Air Laut



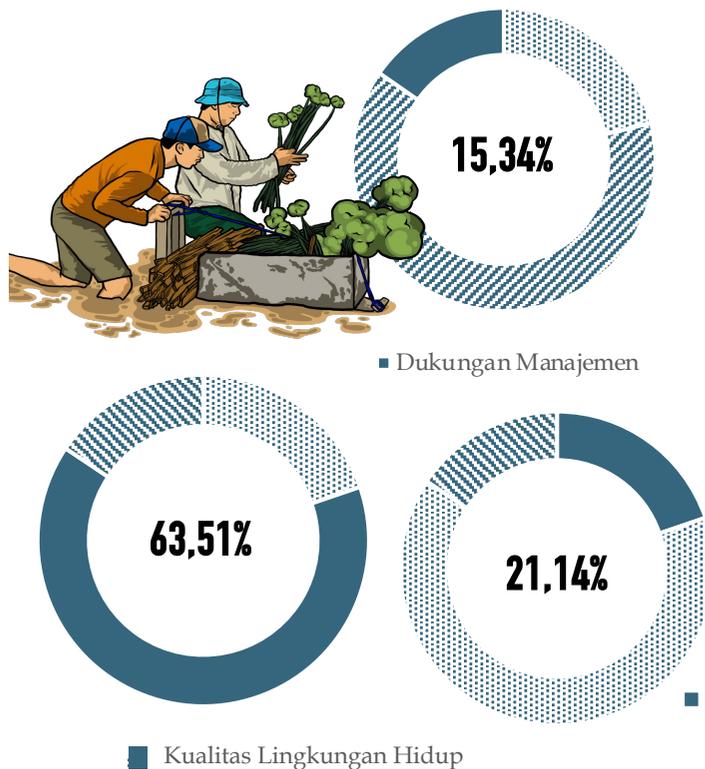
78 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PPKL

Gambar 14. *Highlight* Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE

Pagu Rp368.918.237.000,-



BRGM melaksanakan Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Dukungan Manajemen.

Dari pagu awal sebesar Rp376.198.381.000,- BRGM melakukan realokasi pagu blokir AA belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp1.091.072.000,-; realokasi pagu blokir AA non belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp12.523.061.000,-; dan penambahan pagu sebesar Rp6.333.990.000,- dalam rangka persiapan pelaksanaan proyek Indonesia Mangrove for Climate Coastal Resilience (M4CR).

KINERJA YANG DIHARAPKAN



3.064 Ha

Luas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas yang direhabilitasi



3.000.000 Ha

Luas ekosistem gambut di 7 provinsi yang direstorasi



78 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

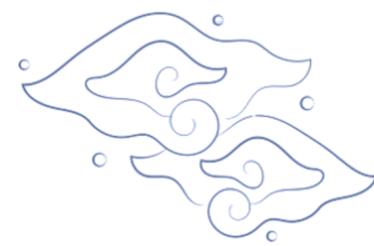
Gambar 15. *Highlight* Kinerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

DUKUNGAN

PEMBANGUNAN NASIONAL



DUKUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Dalam RKP Tahun 2023, KLHK mendapat amanat untuk mendukung Agenda Pembangunan Nasional/Prioritas Nasional (PN). KLHK mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) PN yang ada antara lain: (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. *Highlight* dukungan KLHK untuk PN adalah sebagai berikut.



PN

1

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan prioritas diantaranya: pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemeliharaan dan konservasi sumberdaya air; dan (2) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Dengan kegiatan prioritas diantaranya: peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata.

50

titik mata air yang dipulihkan

400

bangunan pengendali kerusakan perairan darat

15

danau dan segmen sungai yang dikendalikan kerusakannya

37

Layanan Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 6.000 m³/tahun ke atas

15

destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan

PN

2

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESEJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

Kementerian LHK mendukung program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.

1.500 hektar

Rehabilitasi hutan dan lahan di Ibu Kota Negara dan DAS sekitarnya

500 hektar

Pemulihan ekosistem di area Ibu Kota Negara

1 layanan

Penyiapan lahan untuk Ibu Kota Negara

68 ribu hektar

Dukungan penataan Ibu Kota Negara dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi



PN

3

MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas perhutanan sosial, reforma agraria, dan keberantaraan usaha dan dampak sosial; dan (2) peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas Pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

237 kelompok masyarakat

Izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan konservasi dan IPHPS

24

SK pelepasan kawasan hutan untuk tanah obyek reforma agraria

27

Kelompok usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan kelasnya menjadi gold/platinum

30

Kelompok tani hutan mandiri yang dibentuk

472

Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat

PN

6

MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan (3) pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas pemulihan lahan berkelanjutan.

3.375

Usaha dan kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan

300 ribu hektar

Lahan gambut yang dipulihkan

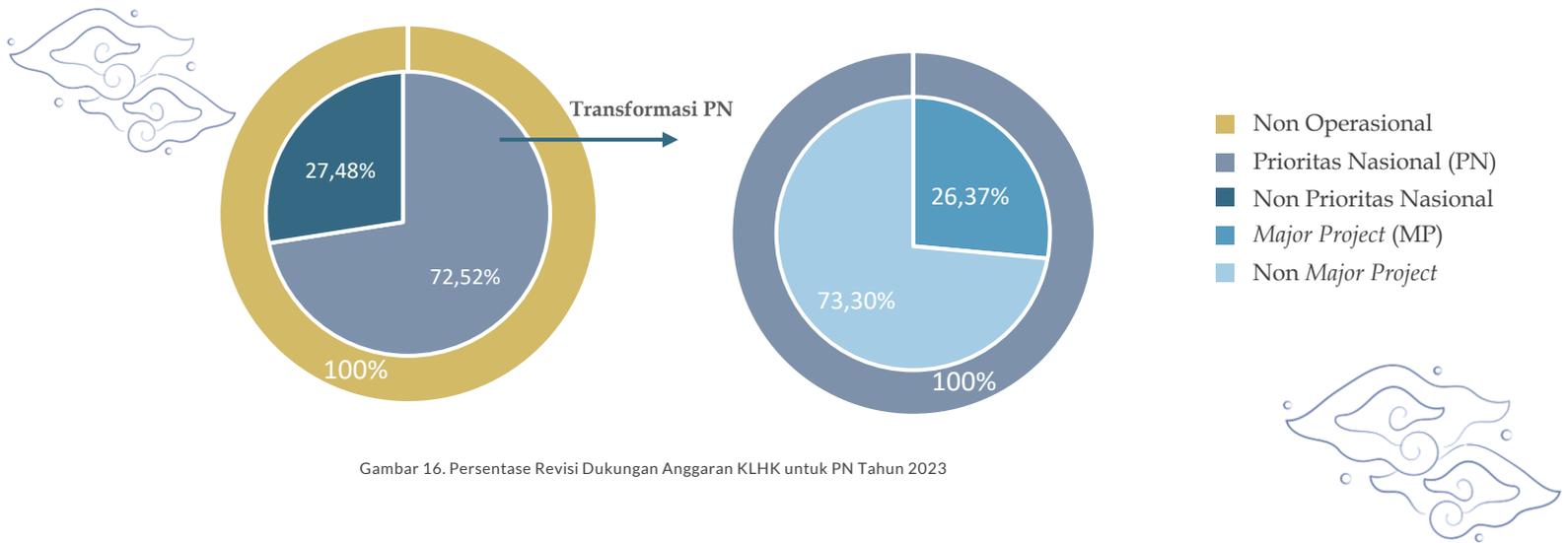
230 kasus

Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani

700 hektar

Luas rehabilitasi mangrove (Ditjen PDASRH)





Gambar 16. Persentase Revisi Dukungan Anggaran KLHK untuk PN Tahun 2023

Tabel 2. Distribusi Anggaran Prioritas Nasional dan Major Project Tahun 2023 (Revisi)

Prioritas Nasional	Anggaran (Rp)
PN 1 - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	729.941.785.000 (22,02%)
PN 2 - Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	47.602.333.000 (1,44%)
PN 3 - Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	268.117.780.000 (8,09%)
PN 6 - Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	2.269.240.069.000 (68,46%)
Total	3.314.901.967.000

Major Project	Anggaran (Rp)
Destinasi Pariwisata Prioritas	58.547.681.000
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	44.162.333.000
Pemulihan 4 DAS Kritis	584.970.757.000
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	32.009.861.000
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	151.651.295.000
Pengolahan Terpadu UMKM	2.670.800.000
Total	874.012.627.000

Dukungan anggaran Prioritas Nasional KLHK total sebesar Rp3.314.901.967.000,- atau 72,52% dari anggaran non operasional KLHK sebesar Rp4.571.146.984.000,-. Angka ini naik sebesar Rp194.475.284.000,- atau 6,23% dari dukungan PN tahun 2023 semula sebesar Rp3.120.426.683.000,-.

Dukungan anggaran Major Project sebesar Rp874.012.627.000,- atau 26,37% dari anggaran Prioritas Nasional KLHK. Angka ini turun sebesar Rp63.117.568.000,- atau 6,74% dari dukungan MP semula sebesar Rp937.130.195.000,-.

Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2023 (Revisi) mendukung penuh Agenda Pembangunan Nasional/ Prioritas Nasional yang telah diamanatkan dengan proporsi anggaran yang menitikberatkan pada Prioritas Nasional. Detil Rincian Output (RO) yang mendukung Prioritas Nasional dan Major Project disajikan dalam lampiran dokumen ini.

PENUTUP



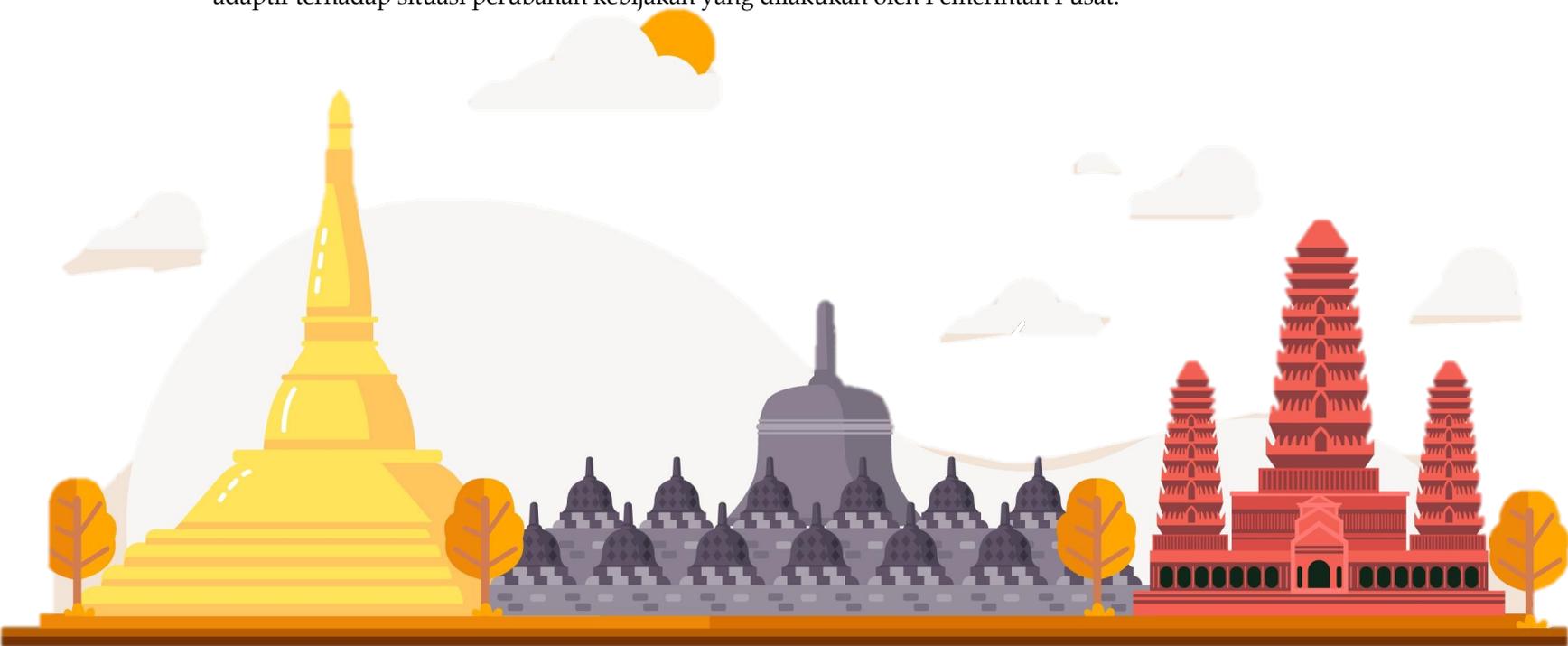
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 (Revisi) menggambarkan target kinerja dan anggaran sesuai perubahan yang terjadi sehubungan dengan dinamika penganggaran diantaranya *Automatic Adjustment (AA)* belanja pegawai dan belanja non pegawai, relaksasi (pemanfaatan) sebagian pagu blokir AA belanja non pegawai, realokasi pagu blokir AA belanja pegawai dan belanja non pegawai ke BA BUN, Anggaran ABT PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), ABT PNPB pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PNBP Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan LH dan PNPB Denda Administrasi Bidang Kehutanan), *Top up* PNPB, serta *Top Up* HLN dan HLLN di beberapa Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK.

KLHK terus berupaya menempuh cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan KLHK juga harus mampu memberikan dampak positif dalam rangka peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia, tidak hanya fokus pada *input*, *proses*, *output* dan *outcome*, tetapi juga harus mampu menjelaskan *impact* dan keuntungan yang diperoleh masyarakat atas capaian-capaian kinerja KLHK.

Selain dukungan anggaran, perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Pusat sebagai pengambil kebijakan dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kegiatan di tingkat tapak. Perlu ada sinkronisasi kebijakan sehingga hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat teratasi bahkan dapat dilakukan percepatan-percepatan agar dampak positif kegiatan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Akhirnya, Rencana Kerja Tahun 2023 (Revisi) ini menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif dan adaptif terhadap situasi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.



LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 (REVISI)



**RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023 (REVISI)**

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
029-DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				122.007.127		128.075.527					
6745-Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK				12.905.288		27.263.188					
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7 Unit	2.805.000	7 Unit	2.710.100					
	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	660 Orang	3.115.288	2.549 Orang	18.260.910					
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	10 Orang	1.200.000	10 Orang	761.250					
	SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	690 Orang	3.025.000	2022 Orang	2.860.128		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan
		002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	690 Orang	2.760.000	883 Orang	2.670.800	44-Pengelolaan Terpadu UMKM	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	05-Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	05-Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	02-Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan
6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan				102.986.839		93.786.839					
	RAA-Sarana Bidang Pendidikan	001-Pengadaan Peralatan Sekolah	5 Paket	4.821.667	5 Paket	4.337.019		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	1 Unit	26.986.840	1 Unit	26.986.840		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
		002-Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah	4 Unit	14.843.918	4 Unit	9.828.566		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	473 Orang	56.334.414	472 Orang	52.634.414		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan				3.115.000		3.115.000					
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	610 Orang	1.855.000	662 Orang	1.855.000					
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga Pendidikan Formal yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	230 Lembaga	780.000	230 Lembaga	860.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17 Lembaga	480.000	17 Lembaga	400.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup
6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM				3.000.000		3.910.500					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Layanan	800.000	5 Layanan	746.000					
		002-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Layanan	800.000	5 Layanan	1.764.500					
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK	900 Orang	1.400.000	900 Orang	1.400.000					
029.FB-Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim				187.468.617		206.997.126					
5446-Adaptasi Perubahan Iklim				6.513.112		5.796.200					
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Kelompok Masyarakat yang difasilitasi untuk mengembangkan Kampung Iklim	6.500 Kelompok Masyarakat	3.813.112	6.500 Kelompok Masyarakat	3.463.112					
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Tingkat Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim	1 Layanan	2.700.000	6 Layanan	2.333.088					
5447-Mitigasi Perubahan Iklim				19.842.800		38.406.279					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga yang difasilitasi implementasi NDC sektor kehutanan dan limbah	10 Lembaga	1.000.000	10 Lembaga	859.351					
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Pemantauan Aksi Mitigasi yang Tervalidasi	6 Layanan	3.000.000	6 Layanan	2.663.010					
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga yang mengimplementasikan Kebijakan Pengendalian Konsumsi Bahan Perusak Ozon dan HFC	3 Lembaga	365.800	3 Lembaga	6.979.073		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah
	PBS-Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	001-Rekomendasi kebijakan Bahan Perusak Ozon (BPO) dan HFC	2 Rekomendasi Kebijakan	534.200	2 Rekomendasi Kebijakan	428.166		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Pre Invesment Bio Carbon Fund For Initiative Sustainable Forest Landscape	5 Lembaga	8.942.800	5 Lembaga	11.623.800		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	03-Pembangunan Rendah Karbon	02-Pemulihan Lahan Berkelanjutan	03-Pengurangan Laju Deforestasi

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-HCFC Phase Out In The Polyurethane Foam Sector Project	3 Badan Usaha	6.000.000	3 Badan Usaha	15.852.879		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah
5448-Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi				5.500.000		11.117.239					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Pedoman Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia	1 NSPK	136.100	1 NSPK	136.100					
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan	2 Layanan	3.613.900	2 Layanan	2.825.216					
		001-Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri pada Tingkat Sub Nasional	10 Layanan	1.750.000	10 Layanan	8.155.923					
6753-Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional				8.750.000		7.663.551					
	ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	001-Rekomendasi kebijakan dukungan implementasi NDC	2 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000	2 Rekomendasi Kebijakan	698.266					
		002-Rekomendasi kebijakan perundingan perubahan iklim	1 Rekomendasi Kebijakan	5.600.000	1 Rekomendasi Kebijakan	5.488.633					
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Sumber daya manusia yang ditingkatkan kapasitasnya di bidang Sains dan Teknologi Rendah Karbon	450 Orang	1.650.000	450 Orang	1.476.652					
5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan				140.758.790		138.902.159					
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1.100 Kelompok Masyarakat	112.000.000	1.200 Kelompok Masyarakat	111.630.443		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan
	QHC-Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	001-Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	1.200 Operasi	13.000.000	1.546 Operasi	13.912.137		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan
		002-Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemadaman Udara	100 Operasi	15.758.790	100 Operasi	13.359.579		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6762-Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim				6.103.915		5.111.698					
	ADA-Standardisasi Produk	001-Standar produk yang diterapkan melalui instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	20 Produk	1.200.000	20 Produk	933.064					
	ADD-Standardisasi Lembaga	001-Lembaga yang dikendalikan melalui standar instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	20 Produk	1.200.000	20 Produk	1.076.701					
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7 NSPK	3.500.000	7 NSPK	2.898.018		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	03-Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pertimbangan teknis standar instrumen ketahanan bencana hidrometeorologis dan perubahan iklim LHK di IKN	1 Layanan	203.915	1 Layanan	203.915		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01-Penganggulangan Bencana	02-Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana
029.FB-Program Kualitas Lingkungan Hidup				877.905.426		968.693.954					
6738-Rehabilitasi Perairan Darat				9.856.842		9.856.842					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Unit Kerja yang ditingkatkan kapasitas dalam Rehabilitasi Perairan Darat	34 Lembaga	1.200.000	34 Lembaga	1.200.000					
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	400 Unit	4.918.304	400 Unit	4.975.682		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	02-Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
	QII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	001-Laporan Pemantauan Danau Prioritas yang Dikendalikan Kerusakannya	15 Unit	2.488.538	15 Unit	2.445.360		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	02-Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi kebijakan pemulihan mata air	50 Unit	1.250.000	50 Unit	1.235.800		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	01-Rehabilitasi Hutan dan Lahan

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6743-Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial				12.419.951		9.583.389					
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Register Kawasan dengan Nilai Keaneekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1 Dokumen	900.000	1 Dokumen	900.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	06-Pencegahan Kehilangan Keaneekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	002-Kebijakan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1 Rekomendasi Kebijakan	1.100.000	1 Rekomendasi Kebijakan	1.100.000		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	06-Pencegahan Kehilangan Keaneekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	003-KEE yang difasilitasi untuk peningkatan efektivitas pengelolaannya	11 Lembaga	1.700.000	14 Lembaga	1.224.275		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	06-Pencegahan Kehilangan Keaneekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem
	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan dengan Nilai Keaneekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	10.000.000 Hektar	8.719.951	10.038.040,78 Hektar	6.359.114		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan				27.245.771		91.627.554					
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7 Rekomendasi Kebijakan	700.000	11 Rekomendasi Kebijakan	2.106.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah
		005-Dokumen Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion	1 Rekomendasi Kebijakan	1.430.000	35 Rekomendasi Kebijakan	19.726.008		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah
		006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan	440.000	2 Rekomendasi Kebijakan	960.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	1 Peta	1.051.523	3 Peta	3.360.523		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	004-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang divalidasi	30 Dokumen	5.989.813	65 Dokumen	10.104.813		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	20 Dokumen	9.136.000	20 Dokumen	9.136.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	22 Layanan	1.100.000	22 Layanan	1.100.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem
		003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	22 Layanan	1.100.000	22 Layanan	1.100.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	007-Sistem kajian dampak lingkungan	40 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.301.850	81 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	30.716.850		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	1 Sistem Informasi	3.392.235	1 Sistem Informasi	10.151.235		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170 Layanan	1.219.350	271 Layanan	2.781.125		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Dokumen	385.000	1 Dokumen	385.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6759-Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup				12.391.569		11.798.199					
	ADA-Standardisasi Produk	001-Standar produk yang diterapkan melalui Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	15 Produk	900.000	15 Produk	849.177					
	ADD-Standardisasi Lembaga	001-Lembaga yang dikendalikan melalui Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	15 Lembaga	900.000	15 Lembaga	870.400					
	CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Layanan laboratorium lingkungan rujukan nasional	1 Unit	125.000	1 Unit	100.000					
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	2 NSPK	1.000.000	2 NSPK	1.000.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		002-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup di IKN	2 NSPK	8.560.000	2 NSPK	8.560.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi dan Pembinaan Akreditasi Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	2 Lembaga	200.000	2 Lembaga	142.508		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	RDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Layanan Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan	1 Unit	706.569	1 Unit	276.114		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut
6760-Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK				2.000.000		1.683.000					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen LHK	75 Lembaga	1.000.000	375 Lembaga	906.600					
	PEA-koordinasi	001-Layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK	1 Kegiatan	200.000	1 Kegiatan	185.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah
		002-Layanan Penerapan Standar Instrumen LHK	10 Kegiatan	800.000	10 Kegiatan	591.400		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				11.009.150		31.762.588					
	QCE-Penanganan Perkara	001-Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	30 Perkara	11.009.150	64 Perkara	31.762.588		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				32.055.816		40.930.084					
	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	1.700.000	420 Orang	3.670.000					
	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	750 Badan Usaha	28.255.816	1.048 Badan Usaha	37.160.084		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		002-Badan Usaha yang dikenakan Sanksi Administratif pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	50 Badan usaha	2.100.000	50 Badan usaha	100.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan				61.209.615		86.902.483					
	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	180 Orang	2.987.880	230 Orang	5.473.216					
	QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	160 Perkara	52.071.735	166 Perkara	56.324.867		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	60 Perkara	6.150.000	250 Perkara	25.104.400		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5456-Pengelolaan Sampah				63.109.129		56.123.523					
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik	1 Unit	4.093.396	1 Unit	3.343.396					
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Kabupaten/kota yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi target penanganan sampah dalam Jakstrada	80 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.800.000	80 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.614.394					

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Pelabuhan yang difasilitasi pelaksanaan Proper dalam pengelolaan sampah	30 Badan Usaha	1.079.233	30 Badan Usaha	679.233		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Kabupaten/Kota yang dinilai kinerja dalam Pengelolaan Sampahnya Melalui ADIPURA	320 Daerah (Prov/Kab/Kota)	14.170.000	320 Daerah (Prov/Kab/Kota)	12.220.000					
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	5 Unit	26.316.500	5 Unit	26.316.500		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik
		002-Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	1 Unit	2.150.000	1 Unit	2.150.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik
		003-Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum	1 Unit	1.250.000	1 Unit	1.250.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik
	BAE-Pelayanan Publik kepada UMKM	001-Layanan Peningkatan Nilai Ekonomi Sampah	70 UMKM	950.000	70 UMKM	850.000					
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi target pengurangan sampah dalam Jakstrada	80 Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.850.000	80 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.050.000					
	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Bank Sampah yang dibina dan difasilitasi	80 UMKM	2.300.000	80 UMKM	1.750.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik
	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Produsen yang difasilitasi dalam penerapan EPR	25 Badan usaha	1.150.000	25 Badan usaha	900.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik
6755-Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun				9.532.640		8.082.640					
	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan B3	4 Rekomendasi Kebijakan	600.000	4 Rekomendasi Kebijakan	455.730					
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Registrasi, Notifikasi, dan Rekomendasi Pengangkutan B3	170 Badan Usaha	832.640	170 Badan Usaha	632.640					
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Fasilitasi dalam rangka pemusnahan Alkes bermerkuri	1 Layanan	2.850.000	1 Layanan	2.000.000					
	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3	1 Sistem Informasi	300.000	1 Sistem Informasi	244.270					
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di lokasi PESK	2 unit	4.950.000	2 unit	4.750.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6756-Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya				43.109.861		37.859.861					
	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	5 Rekomendasi Kebijakan	400.000	3 Rekomendasi Kebijakan	350.000					
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Persetujuan Teknis, Kelayakan Operasi PLB3 dan Rekomendasi	400 Badan Usaha	2.850.000	400 Badan Usaha	2.354.140					
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan pemanfaatan limbah B3 yang mempunyai nilai ekonomi	1 Layanan	600.000	1 Layanan	295.860					
	BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Industri yang dibina dalam mengelola Limbah B3 dan Limbah Non-B3	1.500 Industri	2.850.000	1.500 Industri	2.850.000					
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Fasilitas Pengolahan Limbah B3 medis dari Fasyankes	3 Unit	35.650.000	3 Unit	31.450.000	38- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penganggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu
	RBR-Dukungan Teknis	001-Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu	1 Dokumen	759.861	1 Dokumen	559.861	38- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penganggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu
6757-Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berba				13.700.000		13.500.000					
	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Tanggap Darurat Limbah B3	1 Rekomendasi Kebijakan	200.000	1 Rekomendasi Kebijakan	200.000					
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Sistem Kesiapsiagaan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 di Daerah	12 Layanan	2.009.154	12 Layanan	1.909.154					
	BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Industri yang disupervisi dan dibina Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dari Institusi	10 Industri	2.240.846	10 Industri	2.140.846					
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi yang dipulihkan	5.348 Ton	9.250.000	5.348 Ton	9.250.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan				194.785.726		204.638.112					
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Kualitas Udara Manual	500 Layanan	6.500.000	500 Layanan	5.850.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	12 Layanan	16.900.000	21 Layanan	22.570.336	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut
	RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	38 Layanan	7.715.000	38 Layanan	6.915.000	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut
	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Kualitas Air Manual	652 Layanan	8.600.000	652 Layanan	10.864.431		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut
		008-Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA	40 Layanan	250.000	40 Layanan	250.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	121 Unit	132.420.726	121 Unit	122.165.959	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut
	RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	73 Unit	11.000.000	73 Unit	10.314.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut
	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Kualitas Air Laut	34 Layanan	5.000.000	34 Layanan	4.613.500		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut
		004-Data dan Informasi Sampah Laut	23 Layanan	2.000.000	23 Layanan	2.093.410		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut
		005-Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	514 Layanan	1.900.000	514 Layanan	1.900.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
		006-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut	4 Layanan	2.500.000	48 Layanan	17.101.476		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan				96.135.000		89.580.474					
	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	3.375 Industri	2.000.000	3.375 Industri	1.831.614		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran udara	514 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.100.000	514 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup
	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	002-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	3.375 Industri	9.100.000	3.375 Industri	12.370.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	8 Unit	4.000.000				06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penganggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		002-Instalasi Pengolahan Air Limbah	87 Unit	63.350.000	93 Unit	61.500.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penganggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	514 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.785.000	514 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.752.611		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup
	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	30 Badan Usaha	800.000	30 Badan Usaha	474.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	12 Daerah (Prov/Kab/Kota)	10.600.000	12 Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.454.704		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penganggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005-Layanan kinerja provinsi dalam upaya pengendalian pencemaran pesisir dan laut	34 Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000	34 Daerah (Prov/Kab/Kota)	354.345		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup
	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	003-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	100 Industri	800.000	100 Industri	800.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan
		004-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	400 Unit	1.000.000	330 Industri	443.200		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan
		005-Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	16 Unit	100.000	16 Industri	100.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan
6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan				41.000.000		40.455.983					
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya	5 Unit	1.400.000	14 Unit	5.091.655		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Kerusakan dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut
	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	148 Hektar	20.600.000	148 Hektar	18.831.614		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lahan	514 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.300.000	514 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.300.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
		002-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut	132 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.300.000	132 Daerah (Prov/Kab/Kota)	680.420		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	002-Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	2.250 Hektar	3.000.000	2.250 Hektar	1.814.696		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut
	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi	60 Desa	13.400.000	60 Desa	12.737.598		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6765-Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut				248.344.356		234.309.222					
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut pada 7 Provinsi	106 Layanan	75.987.520	106 layanan	76.691.697		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan
	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Gambut yang Direstorasi	300.000 Hektar	151.019.432	300.000 Hektar	137.137.577		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan
	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Desa mandiri peduli gambut	75 Desa/Kelurahan	21.337.404	75 Desa/Kelurahan	20.479.948		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				2.400.733.947		2.562.750.095					
6729-Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan				19.447.611		15.364.297					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	3 NSPK	904.674	3 NSPK	904.674					
	BAB-Pelayanan Publik Kepada Lembaga	001-Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan	50 Lembaga	1.324.509	50 Lembaga	1.324.509					
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 Dokumen	688.739	1 Dokumen	688.739					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Dukungan Operasional Rencana Pengelolaan Hutan melalui Forest Investment Programme (FIP I)	2 Lembaga	423.500	1 Lembaga	1.731.836					
	BEF-Bantuan Luar Negeri	002-HLN Forest Investment Program (FIP II : Promoting Sustainable Commonity Based Natural Resource Management and Institutional Development Project		4.193.306							
	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	16 Lembaga		16 Lembaga	4.193.306					
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan	15 Lembaga	2.079.749	20 Lembaga	2.288.099		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan
		002-Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	16 Lembaga	9.833.134	16 Lembaga	4.233.134		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6730-Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan				12.732.069		12.932.869					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK usaha pemanfaatan hutan	1 NSPK	300.000	1 NSPK	300.000					
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	38 Dokumen	2.217.143	38 Dokumen	2.417.943					
	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan	40 Badan Usaha	4.890.160	40 Badan Usaha	4.890.160					
	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	39 Badan Usaha	5.324.766	39 Badan Usaha	5.324.766					
6731-Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan				24.051.342		24.214.657					
	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	26 Badan Usaha	7.213.455	26 Badan Usaha	7.209.824					
	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	52 Badan Usaha	9.806.491	52 Badan Usaha	9.806.491	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	1 NSPK	182.310	1 NSPK	182.310					
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani	32 Kelompok Masyarakat	1.600.110	32 Kelompok Masyarakat	1.598.156					
	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	32 Badan Usaha	3.687.874	32 Badan Usaha	3.687.874					
	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Pengesan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	50 Badan Usaha	1.561.102	50 Badan Usaha	1.730.002	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	
6732-Penertiban luran dan Penatausahaan Hasil Hutan				12.614.408		13.284.374					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	1 NSPK	179.833	1 NSPK	179.833					
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	293 Badan Usaha	1.927.459	293 Badan Usaha	1.927.459					
	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/Supervisi luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	85 Badan Usaha	3.327.200	85 Badan Usaha	3.999.250					
		002-Fasilitasi dan Pembinaan Tertib luran dan Penatausahaan hasil Hutan	208 Badan Usaha	2.900.287	208 Badan Usaha	2.898.922					
	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	293 Badan Usaha	4.279.629	293 Badan Usaha	4.278.910					

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan				34.267.744		34.600.860					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1 NSPK	223.310	1 NSPK	223.310					
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	370 Badan Usaha	7.105.110	370 Badan Usaha	7.105.110					
	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	160 Badan Usaha	4.738.897	160 Badan Usaha	4.700.529					
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	348.956	1 Rekomendasi Kebijakan	348.956		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan
	QAC-Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	001-Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	37 Badan Usaha	537.168	37 Badan Usaha	537.168		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan
	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	25 UMKM	5.716.372	25 UMKM	6.496.924		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan
		002-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	75 UMKM	8.773.399	75 UMKM	8.225.431		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan
	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	160 Badan Usaha	1.067.519	160 Badan Usaha	1.206.419		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan
	QJH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kerjanya	170 Badan Usaha	5.757.013	170 Badan Usaha	5.757.013		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
5407-Perbenihan Tanaman Hutan				229.307.972		248.831.085					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	36 Lembaga/Unit Kerja/Tim	2.000.000	36 Lembaga/Unit Kerja/Tim	2.500.000					
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Benih Berkualitas	37.500.000 Butir	2.787.972	37.500.000 Butir	2.504.890		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim
		002-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	41800000 Batang	221.000.000	41800000 Batang	239.616.179		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Sumber Benih Unggul yang Dibangun	10 Hektar	3.520.000	10 Hektar	4.210.016		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim
6734-Konservasi Tanah dan Air				37.269.599		39.937.253					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air	34 Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.500.000	34 Lembaga/Unit Kerja/Tim	2.610.801					
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Fasilitasi Konservasi Tanah dan Air Provinsi Jambi melalui Forest Program II	2 Satker	20.019.629	2 Satker	20.019.629					
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	750 Unit	14.249.970	750 Unit	15.696.823		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Rehabilitasi DAS	15.000 Hektar	1.500.000	15.000 Hektar	1.610.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim
6735-Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai				17.300.000		15.594.240					
	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	34 Sistem Informasi	13.600.000	34 Sistem Informasi	11.387.315		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS	34 Lembaga/Unit Kerja/Tim	2.000.000	34 Lembaga/Unit Kerja/Tim	2.500.000					
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkatkan Kapasitasnya	34 Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.700.000	34 Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.706.925		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6736-Rehabilitasi Hutan				715.365.049		671.161.207					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi hutan	34 Lembaga	2.000.000	34 Lembaga	3.700.426					
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Palu dan Lariang Hulu Sulteng melalui Forest Program III	1 Satker	900.000	1 Satker	900.000					
		002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Mamasa melalui Forest Program IV	3 Satker	54.164.441	3 Satker	57.666.691					
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	12.000 Hektar	634.350.608	12.000 Hektar	584.970.757	36-Pemulihan 4 DAS Kritis	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim
004-Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya		500 Hektar	23.950.000	500 Hektar	23.923.333	10-Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	
6737-Rehabilitasi Mangrove				36.391.336		32.771.650					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Mangrove	34 Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.000.000	34 Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.300.000					
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkatkan Kapasitasnya	34 Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.700.000	34 Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.760.800		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Hutan Mangrove	700 Hektare	33.691.336	700 Hektare	29.710.850		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan
5423-Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan Konservasi				70.865.000		67.087.735					
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	2 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000	2 Rekomendasi Kebijakan	2.846.000					
		002-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan	2 Rekomendasi Kebijakan	900.000	2 Rekomendasi Kebijakan	872.000					
		003-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan	5 Rekomendasi Kebijakan	800.000	5 Rekomendasi Kebijakan	725.000					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (FIP I)	2 Lembaga	408.000	2 Lembaga	1.904.648					
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan	10 Layanan	1.200.000	11 Layanan	987.835		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan	10 Layanan	1.500.000	15 Layanan	1.204.671		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	25 Kelompok Masyarakat	11.300.000	30 Kelompok Masyarakat	9.013.874	02-Destinas Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Destinas Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	15 Unit	14.300.000	17 Unit	16.188.792	02-Destinas Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas
		002-Destinas Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	52 Unit	33.150.000	51 Unit	29.834.275	02-Destinas Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas
		003-Destinas Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	7 Unit	4.307.000	7 Unit	3.510.640	02-Destinas Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas
6739-Perencanaan Kawasan Konservasi				64.779.837		63.733.590					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Forest Programme III - Sulawesi	2 Lembaga	17.031.837	2 Lembaga	21.933.578					
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.600.000	1 Rekomendasi Kebijakan	1.524.945		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Rekomendasi kebijakan Pemolaan, Penataan, dan Rencana Pengelolaan KK	1 Rekomendasi Kebijakan	1.100.000	1 Rekomendasi Kebijakan	1.048.400		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaraan KK	1 Rekomendasi Kebijakan	2.800.000	1 Rekomendasi Kebijakan	2.668.655		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Kawasan konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	30 Rekomendasi Kebijakan	14.300.000	130 Rekomendasi Kebijakan	12.302.510		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif
	AEC-Kerja sama	001-Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	74 Dokumen	5.650.000	76 Dokumen	4.736.715					
	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	7.553.657 Hektar	22.298.000	6284337,77 Hektar	19.518.787		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi
6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi				267.262.678		261.173.934					
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000	1 Rekomendasi Kebijakan	4.487.500					
		002-Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	18.200.000	1 Rekomendasi Kebijakan	18.131.975					
		003-Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.100.000	1 Rekomendasi Kebijakan	1.010.000					
		004-Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.400.000	1 Rekomendasi Kebijakan	1.410.525					
		005-Kebijakan kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan KK	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000	1 Rekomendasi Kebijakan	200.000					
		006-Kebijakan Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	1 Rekomendasi Kebijakan	400.000	1 Rekomendasi Kebijakan	400.000					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	1 Lembaga	8.527.968	1 Lembaga	8.527.968					
		003-Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE)	0 Lembaga	0	3 Lembaga	15.350.638					
		004-Forest Programme II (Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management)	2 Lembaga	5.372.625	2 Lembaga	5.886.625					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	005-Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	5 Lembaga	8.514.250	5 Lembaga	8.514.250					
	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	200 Orang	4.000.000	441 Orang	3.633.496		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	277 Rekomendasi Kebijakan	6.547.835	263 Rekomendasi Kebijakan	5.468.972		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	560 Rekomendasi Kebijakan	129.430.000	483 Rekomendasi Kebijakan	110.630.299		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	500 Lembaga	52.270.000	795 Lembaga	50.085.324		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	500 Kelompok Masyarakat	14.000.000	468 Kelompok Masyarakat	11.974.591		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif
	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	90.000 Hektar	11.500.000	30.580 Hektar	10.391.308		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif
	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	002-Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	180.000 Hektar	5.100.000	39.951,34 Hektar	5.070.463		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif
6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik				106.579.000		129.161.420					
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000	1 Rekomendasi Kebijakan	478.000					
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	13 Rekomendasi Kebijakan	10.290.000	13 Rekomendasi Kebijakan	9.889.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	300 Lembaga	3.600.000	300 Lembaga	2.671.408		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah
		002-Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	500 Lembaga	4.700.000	500 Lembaga	5.385.522		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan
	REB-Konservasi Jenis/Spesies	001-Penyelamatan Satwa Liar	500 Lokasi	31.392.000	500 Lokasi	59.424.826		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	1 Layanan	810.000	1 Layanan	775.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	07-Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	0 Unit	0	0 Unit	0		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah
	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	14100000 Hektar	42.129.000	16223752,44 Hektar	37.429.664		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	003-Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	68000 Hektar	1.358.000	68.000 Hektar	1.358.000	10- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Koridor Satwa dan Pengembangan WRU di IKN	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	10- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Pusat Konservasi Plasma Nutfah di IKN	1 Unit	1.800.000	1 Unit	1.750.000	10- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara
6742-Pemulihan Ekosistem				48.159.000		45.414.262					
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi dan	1 Rekomendasi Kebijakan	3.900.000	1 Rekomendasi Kebijakan	3.600.000					
	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	001-Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	500 Hektar	4.559.000	500 Hektar	4.559.000	10- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara
		002-Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	45000 Hektar	39.700.000	46.252,94 Hektar	37.255.262		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan				317.289.425		425.385.446					
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 layanan	392.000	30 Layanan	392.000					
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Layanan	500.000	1 Layanan	500.000					
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	10.764.901	29 Rekomendasi Kebijakan/ Kajian	15.943.799		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan
		004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4 Rekomendasi Kebijakan/kajian	1.600.000	24 Rekomendasi Kebijakan/ Kajian	9.628.000		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)
		005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	1 Layanan	1.000.000	2 Layanan	2.572.000	10- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara
		001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	4 Rekomendasi Kebijakan	7.546.080	24 Rekomendasi Kebijakan	56.698.943		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)
		002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	22 Rekomendasi Kebijakan	295.486.444	29 Rekomendasi Kebijakan	339.650.704		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				8.472.433		12.074.337					
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1 layanan	950.000	1 Layanan	950.000					
		004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1 layanan	1.500.000	1 Layanan	2.350.000					
		005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 layanan	375.000	2 Layanan	375.000					
		006-Data dan informasi deforestasi	1 Layanan	125.000	1 Layanan	1.056.500					
		007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2 layanan	250.000	2 Layanan	250.000					
		002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	44 layanan	2.961.008	70 Layanan	4.781.412					
		003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	22 layanan	2.311.425	22 Layanan	2.311.425					
		6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Penge				9.838.427		29.029.609			
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penyusunan Rencana kehutanan	3 Rekomendasi kebijakan	544.000	8 Rekomendasi Kebijakan	2.823.011					
		003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000	4 Rekomendasi Kebijakan	2.133.000					
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan	300 layanan	1.888.575	300 layanan	5.351.576					
		002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 layanan	200.000	30 Layanan	2.004.857					
		003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3 Layanan	270.000	3 Layanan	638.446					
		004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12 layanan	498.000	12 layanan	1.748.447					
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1 Layanan	310.000	1 Layanan	3.036.400	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
		005-Data dan Areal Perhutanan Sosial	1 Layanan	500.000	1 Layanan	500.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100 Badan Usaha	5.477.852	213 Badan Usaha	10.793.872					

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6761-Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				31.407.334		30.283.846					
	ADA-Standarisi Produk	051-Standar Produk yang Diterapkan melalui Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	20 Produk	1.200.000	20 Produk	1.070.101					
	ADD-Standarisi Lembaga	051-Standar Usaha yang Diterapkan melalui Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	20 Lembaga	1.200.000	20 Lembaga	1.194.755					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	051-Pelaksanaan FP VI : Protection of Mangrove Forest	1 Lembaga	15.000.000	1 Lembaga	15.000.000					
	CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	051-KHDTK sebagai laboratorium lapangan	38 Unit	4.247.334	38 Unit	3.872.385					
		052-Pengelolaan Laboratorium Kehutanan untuk menyiapkan standar kehutanan yang berkualitas	8 Unit	2.000.000	8 unit	1.580.401					
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3 NSPK	1.500.000	3 NSPK	1.436.800		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan
		001-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (IKN)	7 NSPK	3.440.000	7 NSPK	3.440.000		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	051-Standar Hasil hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK	6 Dokumen	2.700.000	6 Dokumen	2.569.404		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan
	QMA-Data dan Informasi Publik	051-Pemanfaatan Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) oleh stakeholder	1 Layanan	120.000	1 Layanan	120.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan
5444-Peningkatan Penyuluhan				4.038.607		3.973.107					
	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1000 Orang	2.538.607	1000 Orang	2.499.607		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-KTH Mandiri	30 Kelompok Masyarakat	700.000	30 Kelompok Masyarakat	793.000		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	1 Laporan	100.000							03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)	20 Kelompok Masyarakat	700.000	20 Kelompok Masyarakat	680.500		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial				71.966.901		80.640.041					
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	3 Rekomendasi kebijakan/Kajian	700.000	3 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	620.000					
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP-II	1 Kelompok Masyarakat	7.362.001	1 Kelompok Masyarakat	7.362.001					
		002-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project SSF	4 Kelompok Masyarakat	48.024.900	4 Kelompok Masyarakat	57.502.040					
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial	237 Kelompok Masyarakat	10.500.000	237 Kelompok Masyarakat	10.224.000		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKM, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	237 Kelompok Masyarakat	4.500.000	237 Kelompok Masyarakat	4.400.000		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
		003-Kelompok Masyarakat Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi	40 Kelompok Masyarakat	880.000	27 Kelompok Masyarakat	532.000		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
6750-Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat				45.068.400		48.991.400					
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	3 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000	3 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000					
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP-V	3 Kelompok Masyarakat	35.900.000	3 Kelompok Masyarakat	35.900.000					
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan	22 layanan	1.907.400	22 Layanan	1.906.000		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
		002-Kasus konflik tenurial yang difasilitasi penanganannya	26 Layanan	2.959.000	71 Layanan	7.181.000		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
		003-Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak	15 Layanan	2.517.800	15 Layanan	2.267.800		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Identifikasi MHA dan Calon Hutan Adat	13 Kelompok Masyarakat	1.084.200	13 Kelompok Masyarakat	1.036.600		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)					
6751-Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				54.667.510		61.962.257					
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	3 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000	3 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000					
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Project FIP-I	2 Kelompok Masyarakat	8.246.909	2 Kelompok Masyarakat	13.911.471					
		003-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP-III	1 Kelompok Masyarakat	3.416.860	1 Kelompok Masyarakat	5.377.045					
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	304 Kelompok Masyarakat	3.040.000	304 Kelompok Masyarakat	2.940.000		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
		002-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	27 Kelompok Masyarakat	5.087.741	27 Kelompok Masyarakat	4.857.741		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
	QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	001-Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	640 Kelompok Masyarakat	34.176.000	640 Kelompok Masyarakat	34.176.000		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
6752-Kemitraan Lingkungan				38.890.550		34.709.750					
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Kemitraan Lingkungan	3 Rekomendasi kebijakan/Kajian	700.000	3 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000					
	PEE-Kemitraan	001-Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang ditingkatkan	40 Kesepakatan	3.094.000	40 Kesepakatan	2.894.000		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	1510 Orang	35.096.550	1510 Orang	31.115.750		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan				46.034.639		77.435.803					
	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	210 Orang	3.200.000	230 Orang	3.497.902					
	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	51 Operasi	25.944.639	73 Operasi	50.123.595		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	25 Operasi	16.890.000	28 Operasi	23.814.306		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan
6742-Pemulihan Ekosistem				5.000.000		5.000.000					
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Forest Programme VI - Protection of Mangrove Forest	1 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000					

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
6764-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove				71.667.076		78.001.066					
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	3064 Hektar	71.667.076,00	3064 Hektare	78.001.066		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan
029-WA-Program Dukungan Manajemen				3.324.669.841		3.399.615.906					
5367-Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK				9.664.883		9.039.205					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	958-Layanan Hubungan Masyarakat	3 Layanan	7.263.125	3 Layanan	6.637.447					
		994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	2.401.758	1 Layanan	2.401.758					
5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK				20.584.429		19.391.899					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Data dan Informasi	2 Layanan	3.896.451	1 Layanan	5.377.317					
		994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	3.050.000	1 Layanan	3.050.000					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1 Layanan	779.479	12 Unit	610.900					
	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center	1 Sistem Informasi	12.858.499	1 Sistem Informasi	10.353.682					
5369-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi				22.922.330		21.465.487					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	3.239.143	1 Layanan	3.239.143					
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12 Dokumen	19.683.187	12 Dokumen	18.226.344					
5370-Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlen				273.339.638		260.990.746					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1 Layanan	5.901.387	1 Layanan	6.156.308					
		959-Layanan Protokoler	1 Layanan	54.259.633	1 Layanan	18.541.840					
		962-Layanan Umum	3 Layanan	20.654.085	1 Layanan	44.746.029					
		994-Layanan Perkantoran	2 Layanan	192.524.533	2 Layanan	191.546.569					
5372-Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri				9.332.176		8.683.632					
	AEA-Koordinasi	001-Layanan Kerjasama Internasional	3 Kegiatan	7.232.176	3 Kegiatan	6.583.632					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	2.100.000	1 Layanan	2.100.000					

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)						
5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional				88.263.279		87.107.762						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum P3E Jawa	1 Layanan	1.088.806	1 Layanan	1.052.949						
		994-Layanan perkantoran P3E Jawa	1 Layanan	11.557.169	2 Layanan	12.668.962						
		962-Layanan Umum P3E Bali Nusra	1 Layanan	954.335	1 Layanan	942.684						
		994-Layanan Perkantoran P3E Bali Nusra	1 Layanan	10.422.882	1 Layanan	10.288.575						
		962-Layanan umum P3E Kalimantan	1 Layanan	1.346.050	1 Layanan	1.586.275						
		994-Layanan perkantoran P3E Kalimantan	1 Layanan	9.350.802	2 Layanan	9.245.809						
		962-Layanan umum P3E Sulawesi Maluku			1 Layanan	1.359.462						
		994-Layanan Perkantoran P3E Sulawesi Maluku	1 Layanan	11.058.412	2 Layanan	11.331.919						
		962-Layanan Umum P3E Papua	1 Layanan	2.063.200	1 Layanan	1.574.377						
		994-Layanan Perkantoran P3E Papua	1 Layanan	6.966.420	2 Layanan	7.028.895						
		962-Layanan Umum P3E Sumatera			1 Layanan	831.416						
		994-Layanan Perkantoran P3E Sumatera	2 Layanan	11.728.314	2 Layanan	12.662.910						
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal P3E Jawa	59 Unit	816.605	7 Unit	156.000					
			951-Layanan Sarana Internal P3E Bali-Nusra	1 Unit	715.886	17 Unit	161.100					
951-Layanan Sarana Internal P3E Kalimantan	1 Unit		1.009.537	1 Unit	200.000							
951-Layanan Sarana Internal P3E Sulawesi Maluku	6 Unit		1.179.894	35 Unit	600.000							
971-Layanan Prasarana Internal P3E Sulawesi - Maluku	2 Unit		1.415.920									
951-Layanan Sarana Internal P3E Papua	12 Unit		180.000	13 Unit	180.000							
951-Layanan Sarana Internal P3E Sumatera	20 Unit		1.794.641	20 Unit	200.000							

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	11 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.908.125	11 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.067.500					
		001-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Balinusra	8 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.670.221	8 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.745.916					
		003-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.555.251	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.565.000					
		004-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku	30 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.123.997	30 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.185.865					
		005-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	8 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.364.941	8 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.340.132					
		006-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	22 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.991.871	22 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.132.016					
5380-Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK				7.413.787		7.020.046					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	2.427.275	1 Layanan	2.427.275					
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	955-Layanan Manajemen Keuangan	3 Dokumen	4.986.512	3 Dokumen	4.592.771					
5381-Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian & Organisasi KLHK				10.323.884		10.464.933					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1.791.198	1 Layanan	2.359.894					
		994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	2.160.000	1 Layanan	2.160.000					
	EBC-Layanan manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	2.500 Orang	6.372.686	2.500 Orang	5.945.039					
5383-Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-undangan Bidang LHK				6.875.710		6.553.394					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	957-Layanan Hukum	1 Layanan	4.109.760	1 Layanan	3.406.818					
		969-Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	565.950	1 Layanan	946.576					
		994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	2.200.000	1 Layanan	2.200.000					
5859-Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutan				5.116.571		4.906.053					
	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang LH	6 Rekomendasi Kebijakan	2.114.704	6 Rekomendasi Kebijakan	1.147.632					
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Kehutanan	6 Rekomendasi Kebijakan	1.645.352	6 Rekomendasi Kebijakan	2.401.906					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.356.515	1 Layanan	1.356.515					
5860-Penyelenggaraan Keteknikian LHK				3.892.072		3.296.976					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-NSPK Keteknikian Bidang LHK dan Penerapannya di Satker/UPT/KPH	3 NSPK	2.614.470	3 NSPK	2.019.374					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.277.602	1 Layanan	1.277.602					

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen				46.264.618		47.690.469					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1 Layanan	3.644.422	1 Layanan	4.857.690					
		963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1.180.000	1 Layanan	1.710.527					
		994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	33.290.196	1 Layanan	32.570.570					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	265 Unit	4.200.000	266 Unit	4.961.839					
		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	2.650.000	1 Layanan	2.488.765				
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10 Dokumen	800000	10 Dokumen	955122					
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi		19 Dokumen	500000	19 Dokumen	145956						
5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LH				38.065.910		30.747.391					
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	001-Layanan Manajemen Resiko	67 Laporan	7.363.035	67 Laporan	4.931.602					
		002-Layanan Pengendalian Internal	67 Laporan	5.725.470	72 Laporan	4.899.809					
		965-Layanan Audit Internal	364 Laporan	24.977.405	380 Laporan	20.915.980					
5389-Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN				7.500.000		6.130.011					
	BAH-Layanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1 Layanan	3.600.000	1 Layanan	3037911					
		002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1 Layanan	3.900.000	1 Layanan	3092100					
5396-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL				149.511.460		149.260.103					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	17 Layanan/Laporan/Dokumen	16.408.712	17 Layanan/Laporan/Dokumen	16.189.207					
		994-Layanan Perkantoran	17 Layanan/Laporan/Dokumen	132.471.748	17 Layanan/Laporan/Dokumen	132.256.701					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	287 Unit/m2/Paket	631.000	287 Unit/m2/Paket	626.195					
		971-Layanan Prasarana Internal	0 Unit/m2/Paket		1 Unit/m2/Paket	188.000					
5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jen				318.710.849		310.321.704					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	37 Layanan/Laporan/Dokumen	47.029.390	37 Layanan/Laporan/Dokumen	45.749.730					
		994-Layanan Perkantoran	37 Layanan/Laporan/Dokumen	271.681.459	37 Layanan/Laporan/Dokumen	264.571.974					
5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konser				1.092.718.645		1.075.417.296					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	75 Layanan	62.133.486	75 Layanan	59.862.651					
		994-Layanan Perkantoran	75 Layanan	1.014.613.159	75 Layanan	999.276.245					

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	75 Unit	6.389.000	83 Unit	8.269.814					
		971-Layanan Prasarana Internal	75 Unit	9.583.000	8 Unit	8.008.586					
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jen				239.797.991		327.821.688					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen	962-Layanan Umum	23 Layanan	33.344.400	23 Layanan	58.526.660					
		994-Layanan Perkantoran	23 Layanan	204.283.591	23 Layanan	197.815.595					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal			3072 Unit	54.946.664					
		971-Layanan Prasarana Internal	2 Unit	2.170.000	17 Unit	16.532.769					
6758-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ba				211.037.870		188.772.441					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	17 Layanan	12.404.323	17 Layanan	11.707.278					
		994-Layanan Perkantoran	17 Layanan	198.436.747	17 Layanan	176.958.363					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	11 Unit	196.800	11 Unit	106.800					
5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM				170.109.216		173.174.691					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	12 Layanan	17.075.825	12 Layanan	20.389.111					
		994-Layanan Perkantoran	15 Layanan	151.188.391	15 Layanan	150.090.624					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	8 Paket	1.085.000	11 Paket	2.205.041					
		971-Layanan Prasarana Internal	4 Paket	760.000	4 Paket	489.915					
5413-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhut				88.928.987		92.114.255					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	6 Layanan/Laporan/Dokumen	25.793.439	7 Layanan	25.076.563					
		994-Layanan Perkantoran	6 Layanan/Laporan/Dokumen	59.035.548	7 Layanan	62.237.692					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	6 Unit/m2/Paket	4.100.000	7 Unit	4.800.000					
5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penega				203.901.883		258.724.289					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	6 Layanan	16.846.009	6 Layanan	41.091.440					
		994-Layanan Perkantoran	6 Layanan	184.389.874	6 Layanan	180.358.679					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1 Unit	2.666.000	6 Unit	37.274.170					

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL
			TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu rupiah)					
5445-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengen				108.718.658		109.673.454					
	EBA-Layanan Dukungan	962-Layanan Umum	6 Layanan	3.666.165	6 Layanan	3.666.165					
		994-Layanan Perkantoran	12 Layanan	101.752.493	12 Layanan	102.707.289					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	6 Layanan	800.000	6 Layanan	800.000					
		971-Layanan Prasarana Internal	1 Kegiatan	2.500.000	1 Kegiatan	2.500.000					
6754-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jen				74.333.143		72.360.579					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1 Layanan/Laporan/ Dokumen	32.575.568	1 Layanan	28.292.176					
		994-Layanan Perkantoran	1 Layanan/Laporan/ Dokumen	41.757.575	1 Layanan	44.068.403					
5457-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengen				61.154.903		61.879.453					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	47.542.106	1 Layanan	48.266.656					
		962-Layanan Umum	1 Layanan	13.612.797	1 Layanan	13.612.797					
6763-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Restora				56.186.949		56.607.949					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	28.393.881	1 Layanan	28.814.881					
		962-Layanan Umum	1 Layanan	27.793.068	1 Layanan	27.793.068					
TOTAL				6.912.784.958		7.266.132.608					

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KLHK
©2023

